



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

25<sup>TH</sup> KKP  
SAIL BEYOND  
WITH BLUE ECONOMY



# LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

#2024  
KKP BEYOND



**BerAKHLAK**  **bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **#melayani**  
**bangsa**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2023. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP Tahun 2023 mencapai 113,61%, dengan kategori “istimewa” seluruh indikator yang diperjanjikan tercapai sesuai dan melebihi target yang ditetapkan. Secara ringkas capaian indikator Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 19 indikator kinerja;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator kinerja;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 indikator kinerja.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat</b>				
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73	85,62	117,29
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87%	100%	114,94
<b>Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif</b>				
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100,00
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	97,21	108,74
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	101,21	120,00
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	96,05	120
<b>Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif</b>				
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	95,72	119,65
<b>Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif</b>				
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	93,44	108,65
<b>Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				
9	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	75,76	108,23

No.	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
10	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	12	14	116,67
11	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (level)	3,10	3,88	120,00
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78	87,50	112,18
13	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	80,5	82,35	102,30
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022 (%)	≤0,5%	0,03%	120,00
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	100%	120,00
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	111,85%	120,00
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	77,5%	90,58%	116,88
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	77,5%	100%	120,00
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75	81,55	108,73
20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,75	91,79	97,91
21	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	89,97	104,62

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan tahun 2023 antara lain: pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, operasional pusat pengendalian, pembangunan prasarana dan sarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar **Rp. 1.123.693.531.000,-**. Anggaran tersebut didistribusikan pada 1 (satu) satker pusat (5 unit kerja), 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2023 sebesar Rp. **1.119.216.743.475** ; atau **99,60%**. Dengan memperhatikan realisasi anggaran dan capaian kinerja ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Ditjen PSDKP pada tahun 2023 adalah sebesar 3,68.

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.



Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Ditjen PSDKP. Kinerja Ditjen PSDKP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran Program sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) tahun 2023 telah menunjukkan keberhasilan dibuktikan dengan pencapaian kinerja sebesar 113,61% kategori **"Istimewa"**. Capaian kinerja tersebut selaras dengan realisasi anggaran sebesar 99,60%. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan penyusunan perencanaan kedepan khususnya dalam mengawal kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu "Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi" dan core value "ASN BerAKHLAK"** mewujudkan PSDKP menjadi **Benteng KKP yang Hebat** dalam mengawal **Kebijakan Ekonomi Biru**.

Jakarta, 31 Januari 2024  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

# DAFTAR ISI

**i** Ikhtisar Eksekutif

**iii** Kata Pengantar

**iv** Daftar isi

**1** Pendahuluan

**4** Perencanaan Kinerja

**12** Akuntabilitas Kinerja

**57** Penutup



## BAB I PENDAHULUAN

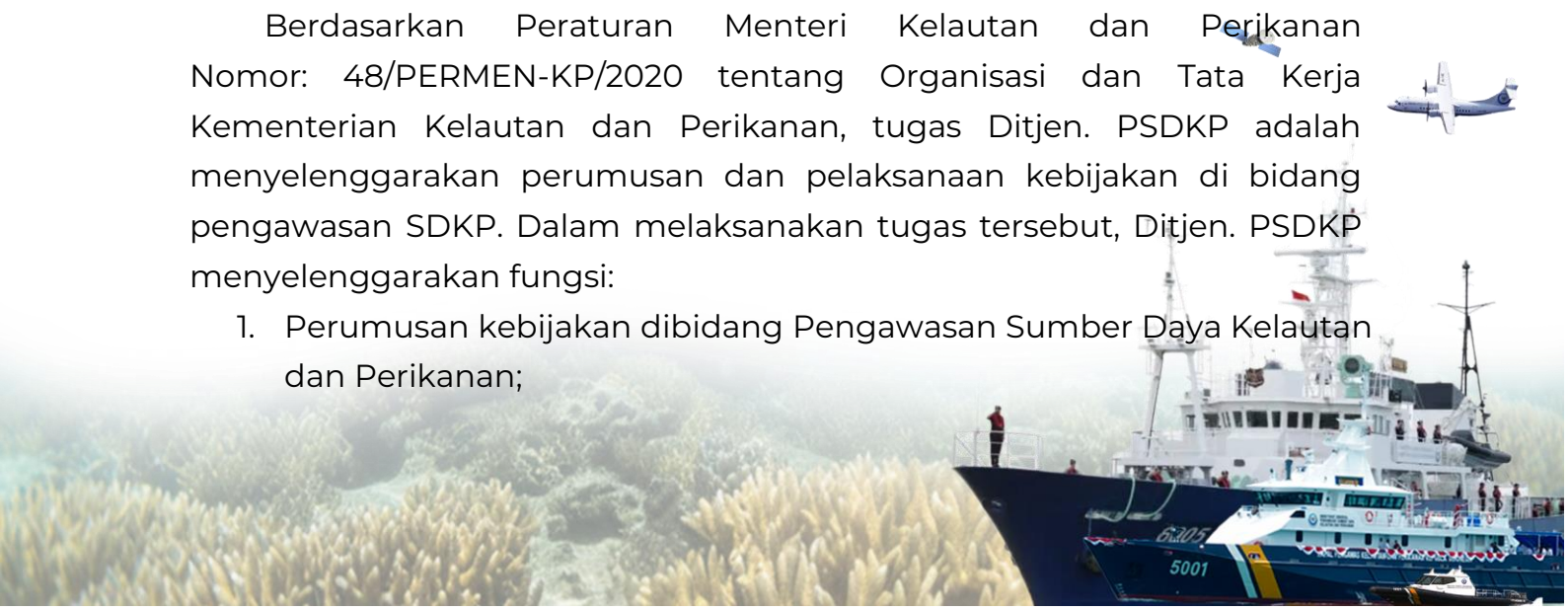
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru.



### A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;



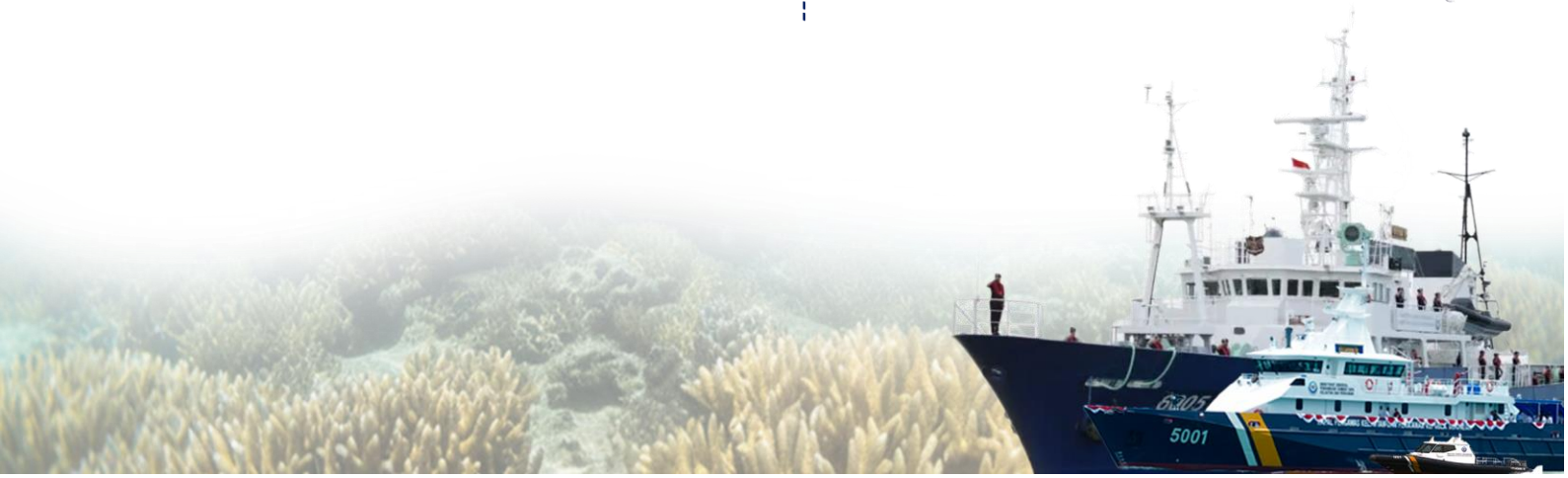
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:

## TINGKAT PUSAT



## TINGKAT UPT



## B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan masih ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pelaku usaha kelautan dan perikanan belum seluruhnya memahami ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatam sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Pemanfaatan Ruang laut, pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mengawal kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi belum memiliki perizinan.
5. Peran serta pemerintah daerah yang masih rendah dalam pengawasan SDKP.

## C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP



Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

Dengan misi:

-  Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
-  Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
-  Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab
-  Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP



## 2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

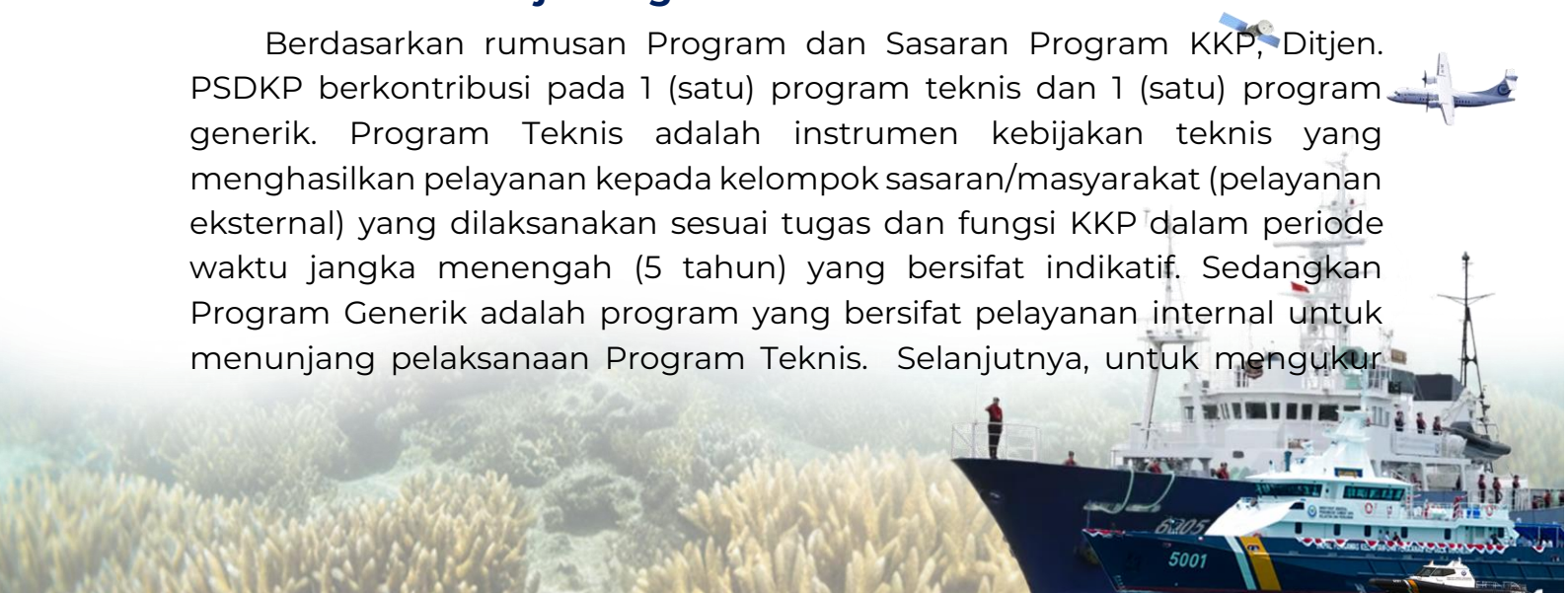
- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

## 3. Indikator Kinerja Program

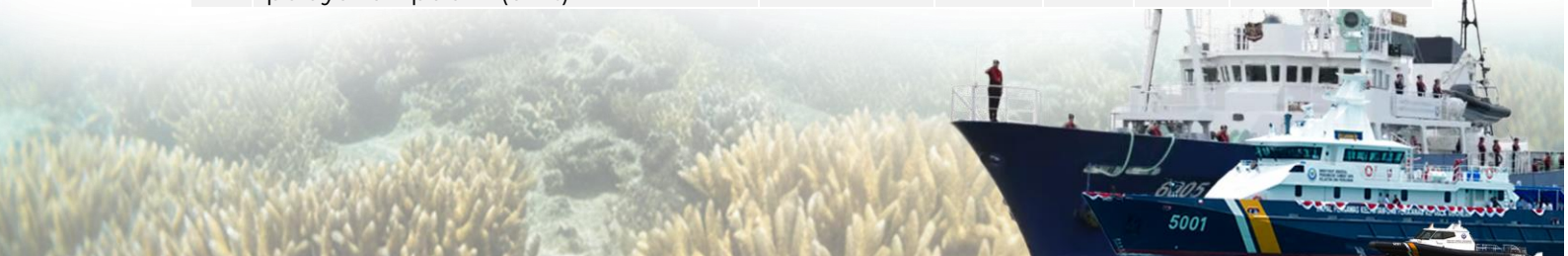
Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur



sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (outcome). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024**

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat						
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif						
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas						
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	Persentase	93	93	93	93	93
Program 2 Dukungan Manajemen							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	Indeks	72	73	74	75	76
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1



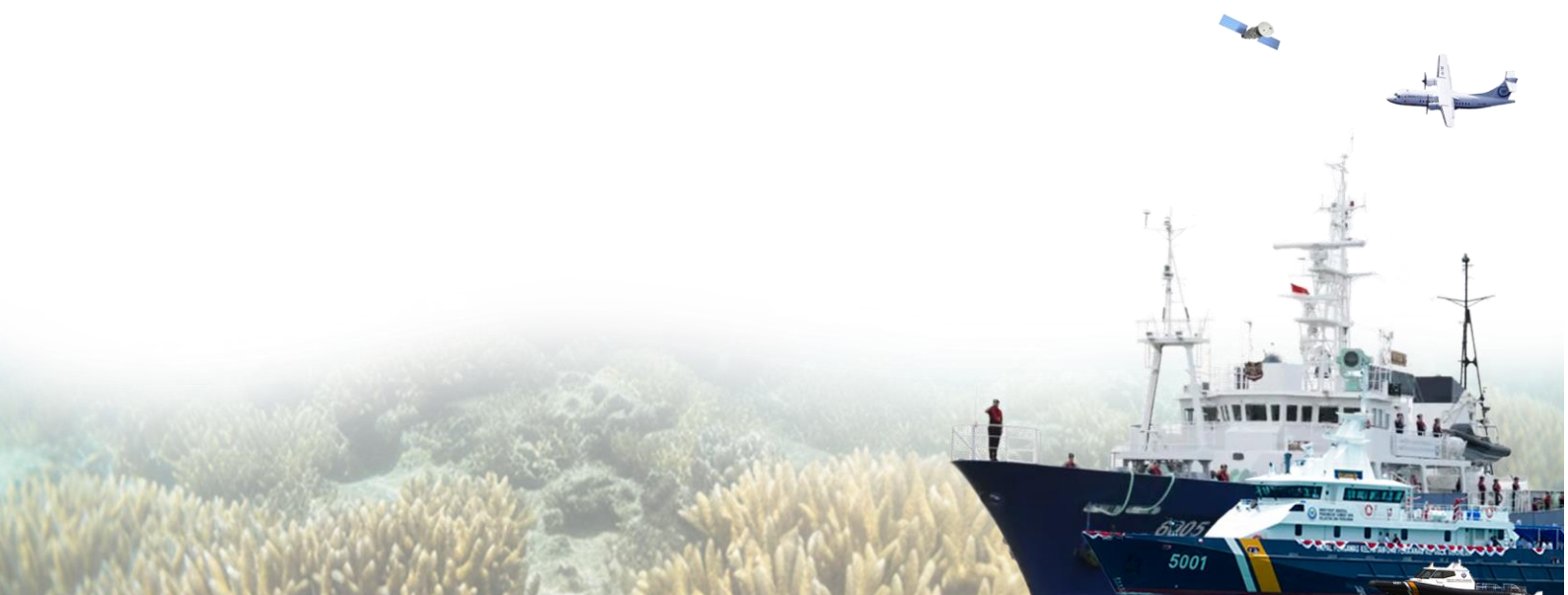
Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana dibahas dibawah ini.

## B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Ditjen PSDKP telah melakukan reviu terhadap Renstra untuk melakukan analisis dan evaluasi formulasi Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 pada tahun 2020 dan 2021 difokuskan pada komponen-komponen di dalam Renstra, seperti: Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan relevansinya dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis serta ketentuan kerangka logis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Berdasarkan hasil reviu diatas Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

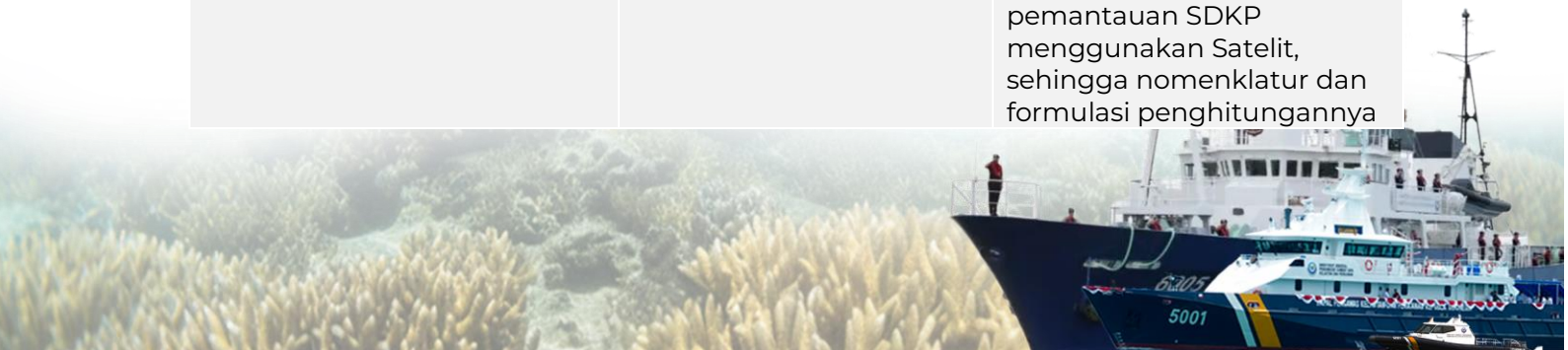
**Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024**

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

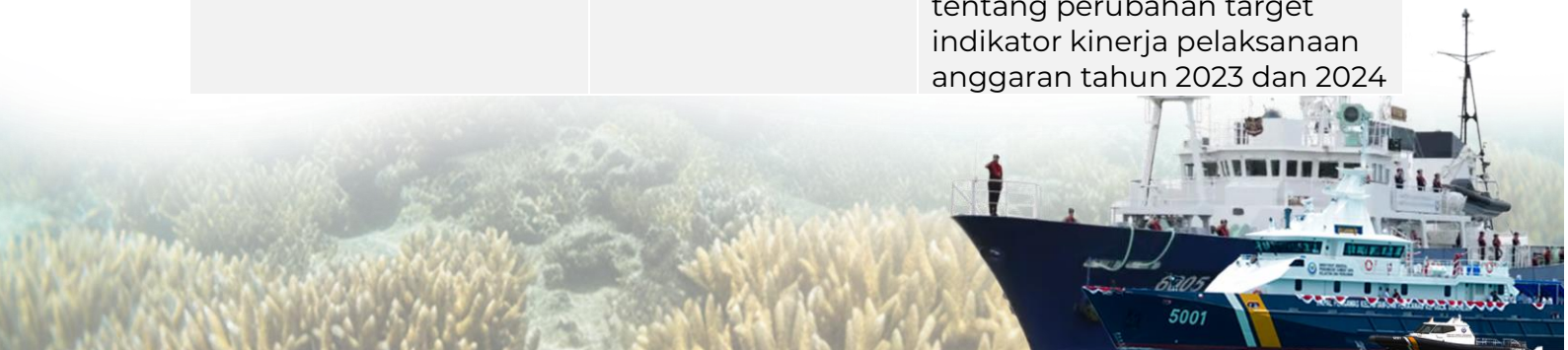
Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Persentase kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya



Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Pada akhir triwulan III tahun 2023 perjanjian kinerja mengalami perubahan kembali menjadi 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dengan pengurangan satu IKM "Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP". Serta adanya perubahan target beberapa indikator sebagai berikut:

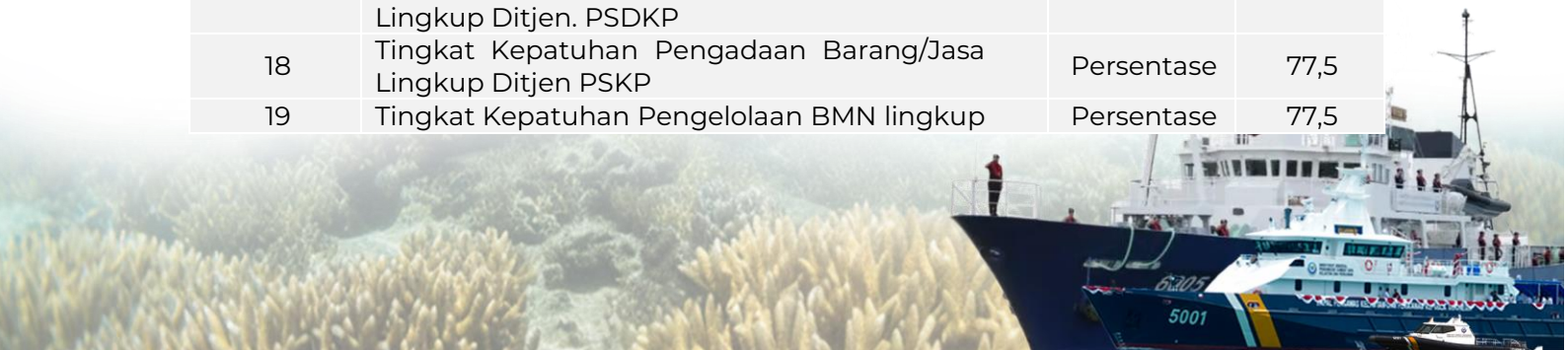
Indikator Kinerja sebelumnya	Indikator Kinerja revisi	Dasar perubahan
Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Tidak ada	ND Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023
Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP Target : 3	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai) Target 3,10	ND Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP <b>Target 89</b>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP <b>Target 93,75</b>	Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1903/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 6 November dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.6318/PSDKP.1/TU.210/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang perubahan target indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan 2024



Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023**

<b>Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	73
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	87
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	89,4
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	80
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
<b>Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
<b>Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif</b>			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
<b>Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
9	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
10	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	12
11	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	Nilai	3,10
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	78
13	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	80,50
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	75
16	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
17	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	92
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	77,5
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup	Persentase	77,5

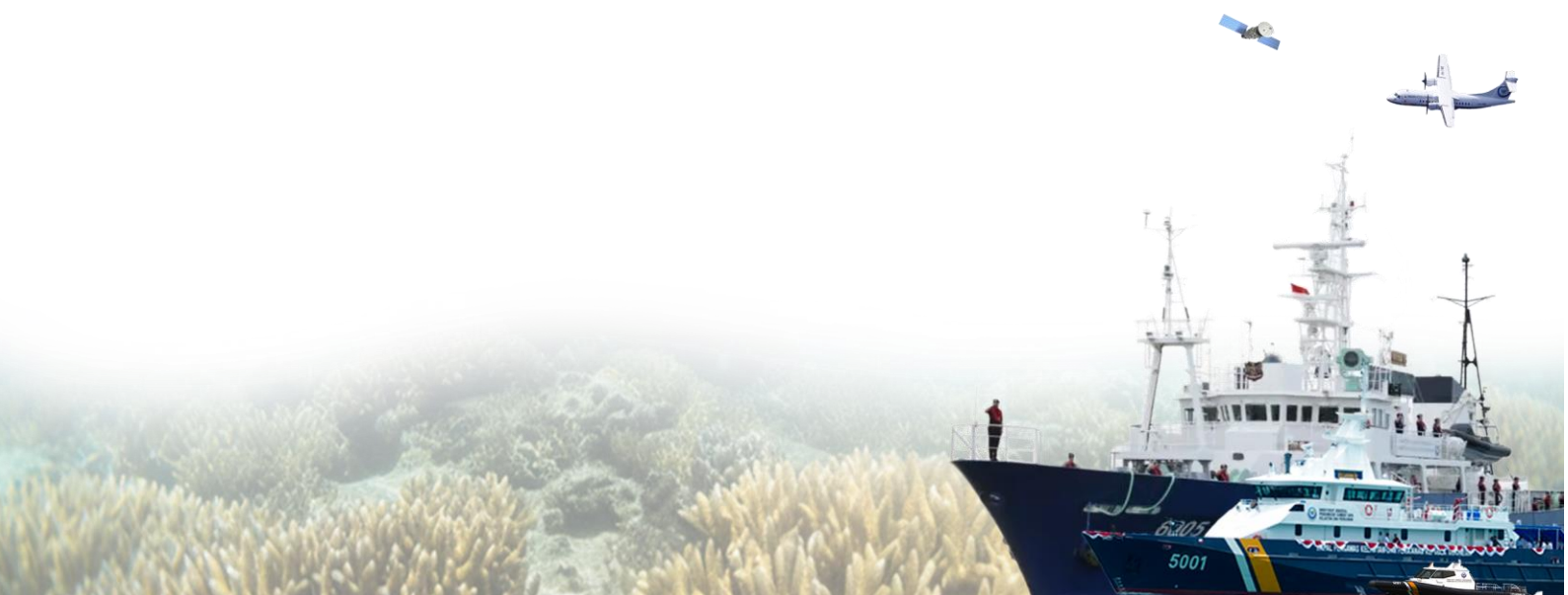


	Ditjen PSDKP		
20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	93,75
21	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

### C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.





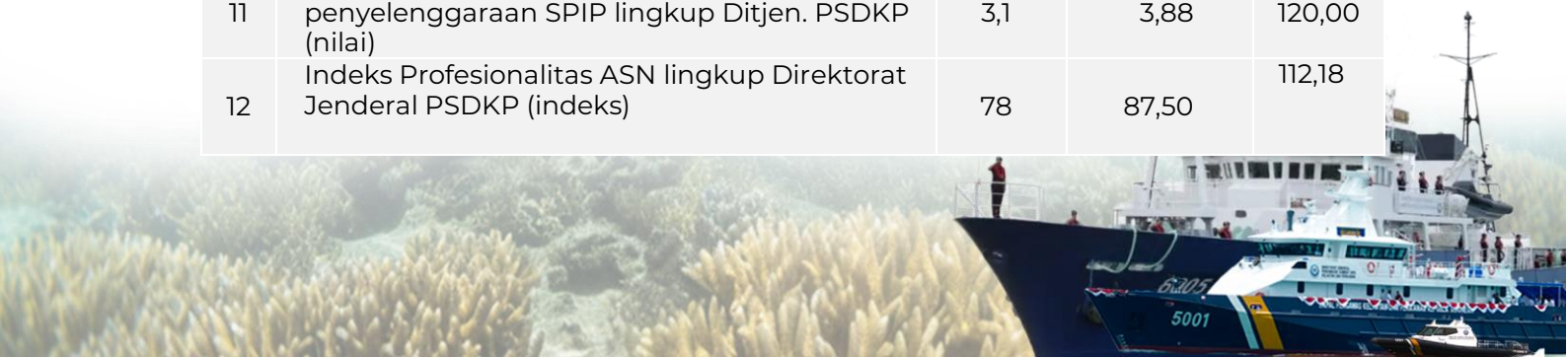
## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP sebesar 113,61%, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan pada **tabel 3.1.**

**Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023**

No.	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat</b>				
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73	85,62	117,29
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87%	100%	114,94
<b>Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif</b>				
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100,00
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	97,21	108,74
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	101,21	120,00
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	96,05	120
<b>Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif</b>				
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	95,72	119,65
<b>Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif</b>				
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	93,44	108,65
<b>Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				
9	Indeks Kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70	75,76	108,23
10	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP (unit)	12	14	116,67
11	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	3,1	3,88	120,00
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78	87,50	112,18



No.	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	80,5	82,35	102,30
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022 (%)	≤0,5%	0,03%	120,00
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	100%	120,00
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	111,85%	120,00
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PSDKP (%)	77,5%	90,58%	116,88
18	Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PSDKP (%)	77,5%	100%	120,00
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75	81,55	108,73
20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,75	91,79	97,91
21	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP (nilai)	86	89,97	104,62

## B. Evaluasi & Analisis

### SASARAN PROGRAM 1 KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

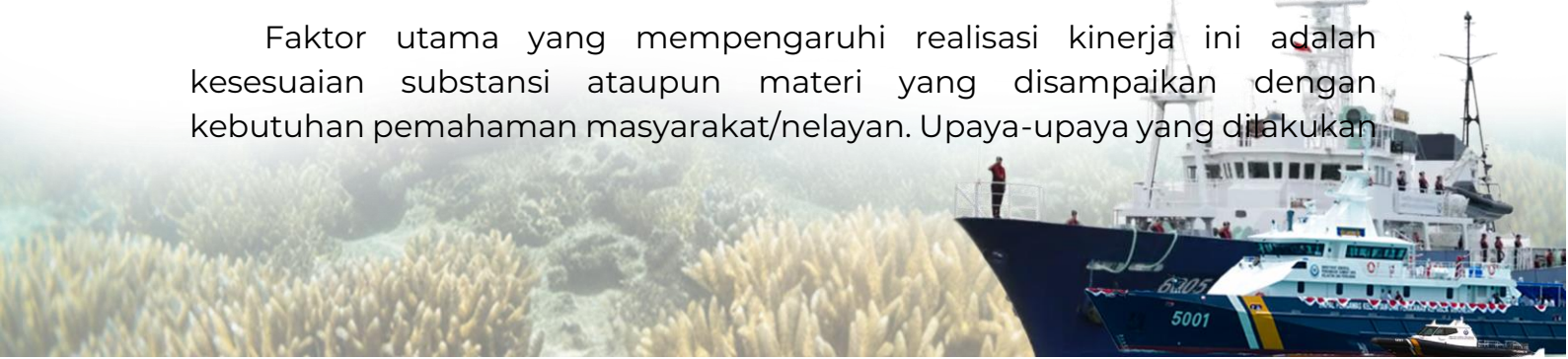
#### IKU 1 Nilai Pemahaman Masyarakat dalam Pemanfaatan SDKP yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	73	85,62	117,29	-	-

Indikator kinerja ini ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2023 sebesar 73 telah terealisasi 85,62 yang merupakan rerata nilai post test dari 3 (tiga) kegiatan yaitu pemberian pemahaman kepada:

1. Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan;
2. Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
3. Nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara illegal.

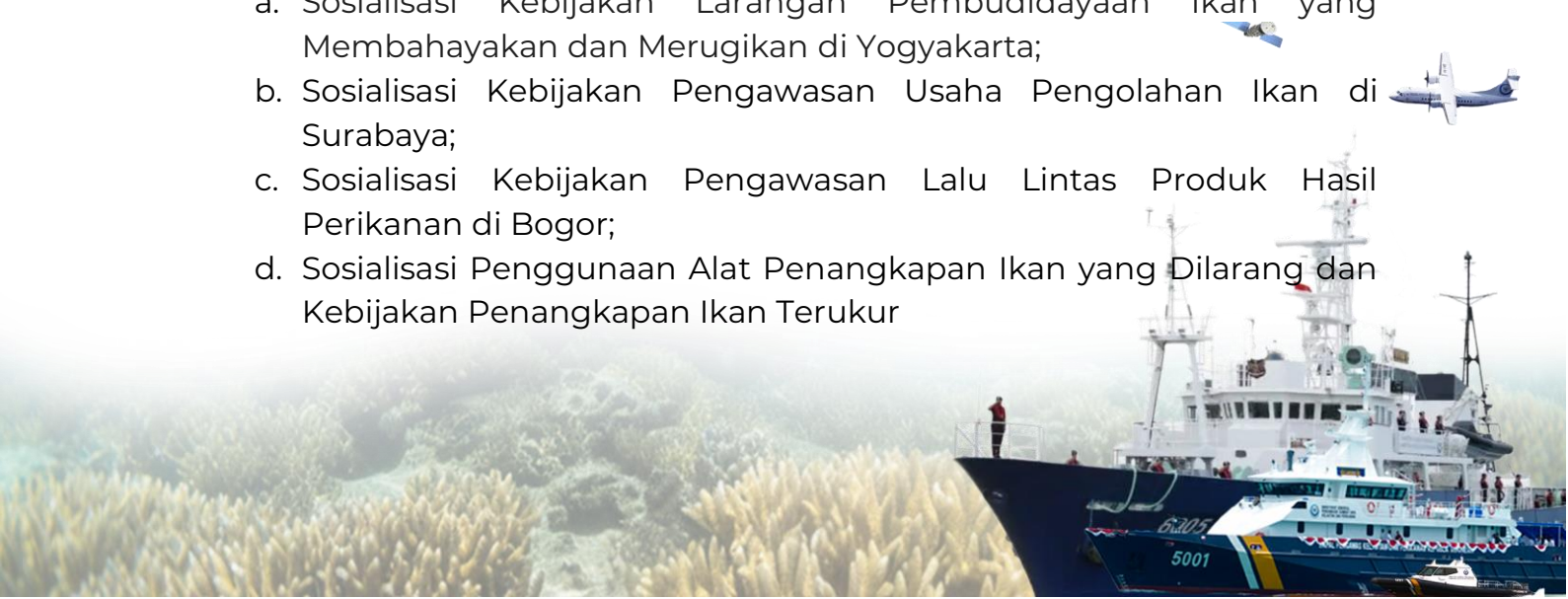
Faktor utama yang mempengaruhi realisasi kinerja ini adalah kesesuaian substansi ataupun materi yang disampaikan dengan kebutuhan pemahaman masyarakat/nelayan. Upaya-upaya yang dilakukan



adalah dengan menetapkan lokasi pemberian pemahaman sesuai dengan besar atau kecilnya potensi terjadi kegiatan pemanfaatan SDKP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kegiatan penyadartahuan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya kelautan.

Uraian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut.

1. Pemberian pemahaman pemanfaatan sumber daya kelautan Pada tahun 2023, Ditjen PSDKP telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan yang melibatkan sebanyak 900 orang dengan kegiatan berupa:
  - a. Sosialisasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Bali;
  - b. Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Jasa Kelautan & Penyelesaian Sengketa WP3K di Morowali;
  - c. Kampanye Penanggulangan *Destructive Fishing* di Putusibau
  - d. Kampanye Perlindungan Penyu di Morowali;
  - e. Sosialisasi Pengendalian & Pengawasan Pencemaran Perairan di Tegal;
2. Pemberian pemahaman pemanfaatan sumber daya kelautan Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan di 4 (empat) lokasi melibatkan kurang lebih 620 orang yaitu:
  - a. Sosialisasi Kebijakan Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan di Yogyakarta;
  - b. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan di Surabaya;
  - c. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan di Bogor;
  - d. Sosialisasi Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang dan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur



3. Pemberian pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara illegal

Kegiatan pemberian pemahaman nelayan dilaksanakan di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke dengan sasaran kegiatan 150 orang nelayan/keluarga nelayan, pemilik kapal/pemodal di wilayah sKabupaten Merauke. Pemberian pemahaman kepada nelayan di Kabupaten Merauke bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi para nelayan, keluarga nelayan, pemilik kapal dan/atau pemodal khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan agar tidak menangkap ikan di wilayah perairan negara lain tanpa izin.

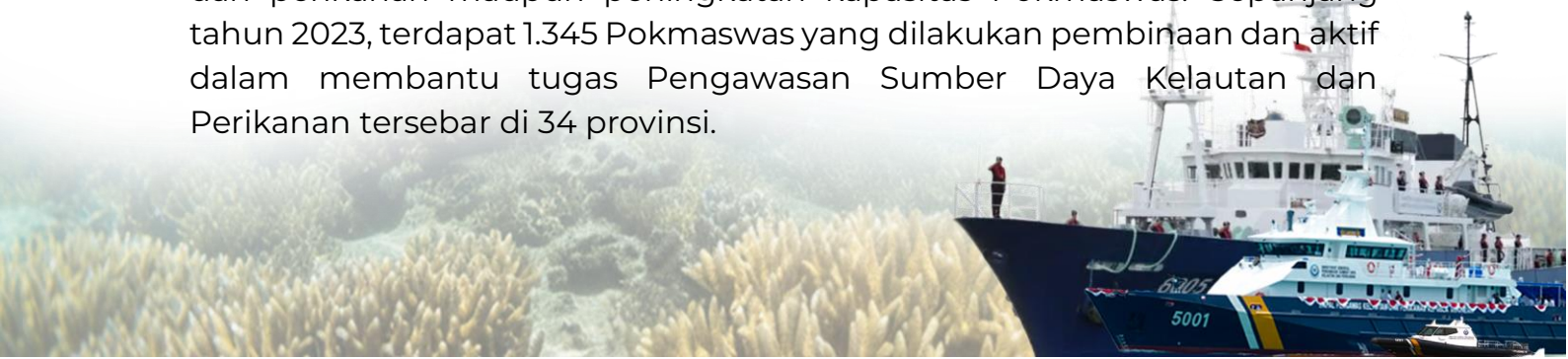


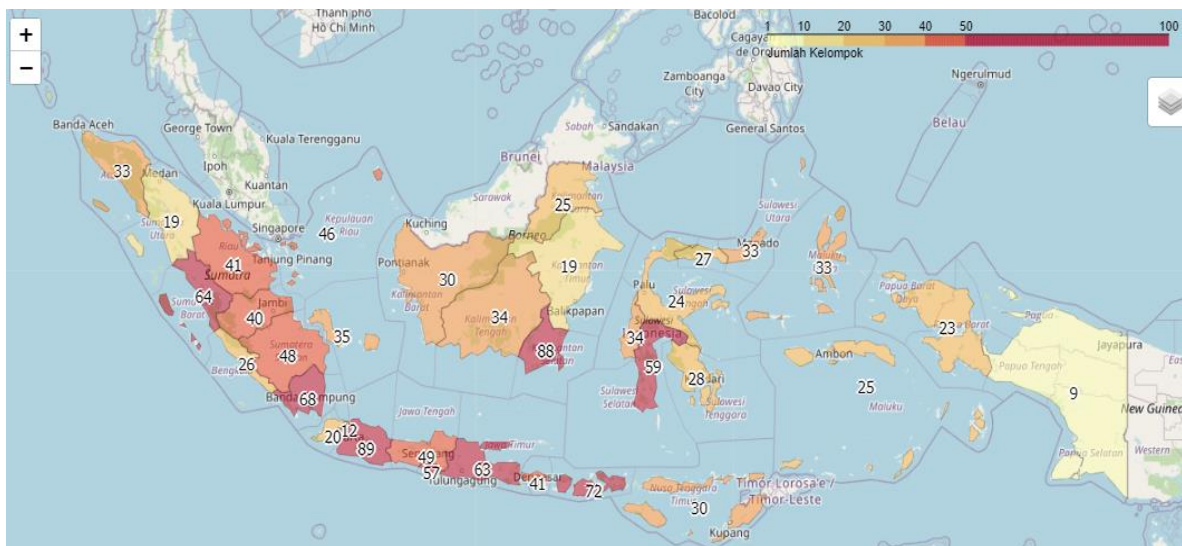
### **IKU 2 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	87	100	114,94	-	-

Indikator kinerja ini mengukur tingkat keaktifan (Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai hasil dari upaya pembinaan terhadap Pokmaswas yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP melalui UPT PSDKP dan DKP Provinsi yang disampaikan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk belum dicantumkan dalam renstra Ditjen PSDKP.

Pokmaswas dianggap aktif apabila telah melaporkan kegiatan berkaitan dengan upaya mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kapasitas Pokmaswas. Sepanjang tahun 2023, terdapat 1.345 Pokmaswas yang dilakukan pembinaan dan aktif dalam membantu tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebar di 34 provinsi.



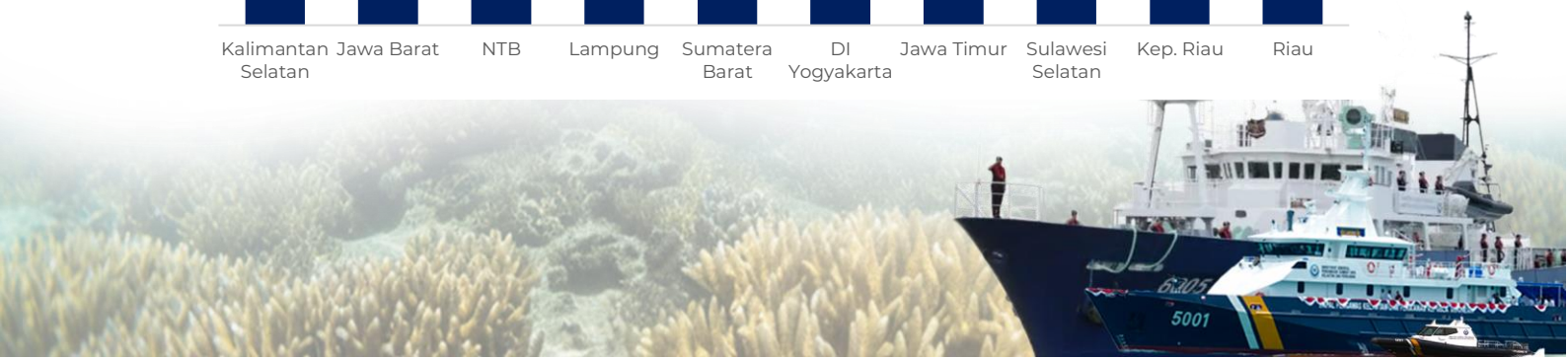
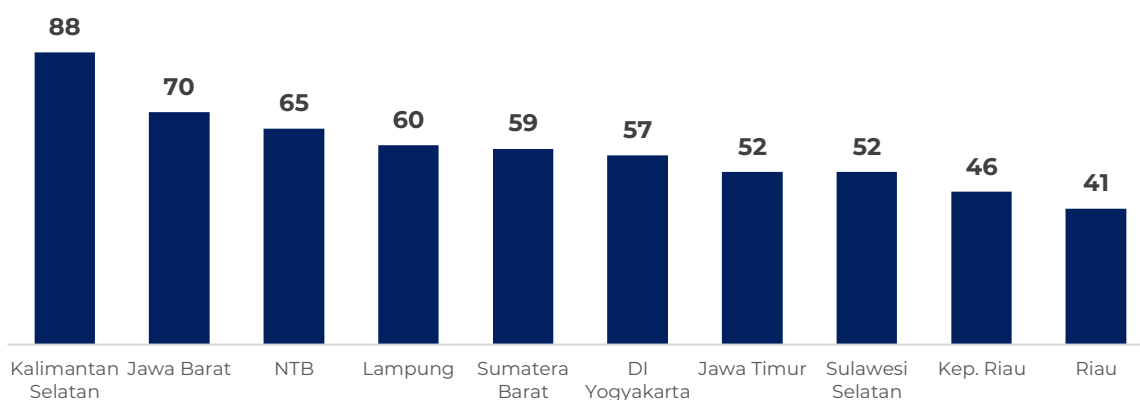


Gambar 3.1 Sebaran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Faktor utama yang menyebabkan tercapainya kinerja melebihi target adalah supervisi pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan melalui:

- 1) Koordinasi dan Pengawasan dengan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- 2) Peningkatan Kualitas melalui penyampaian arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan.
- 3) Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.

Pada tahun 2023 jumlah Pokmaswas yang aktif paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 88 pokmaswas tersebar di seluruh kabupaten/kota. 10 (sepuluh) provinsi yang pokmaswasnya tercatat banyak aktif pada tahun 2023 sebagai berikut.



Sebagai upaya peningkatan kualitas pencapaian indikator kinerja ini kedepannya, perlu diupayakan mengidentifikasi pokmaswas yang akan dilakukan pembinaan keaktifan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan utama dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat. Pada kegiatan ini disepakati penetapan lokasi serta waktu pelaksanaan penyadartahuan masyarakat khususnya pembinaan POKMASWAS tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh UPT Pengawasan SDKP.



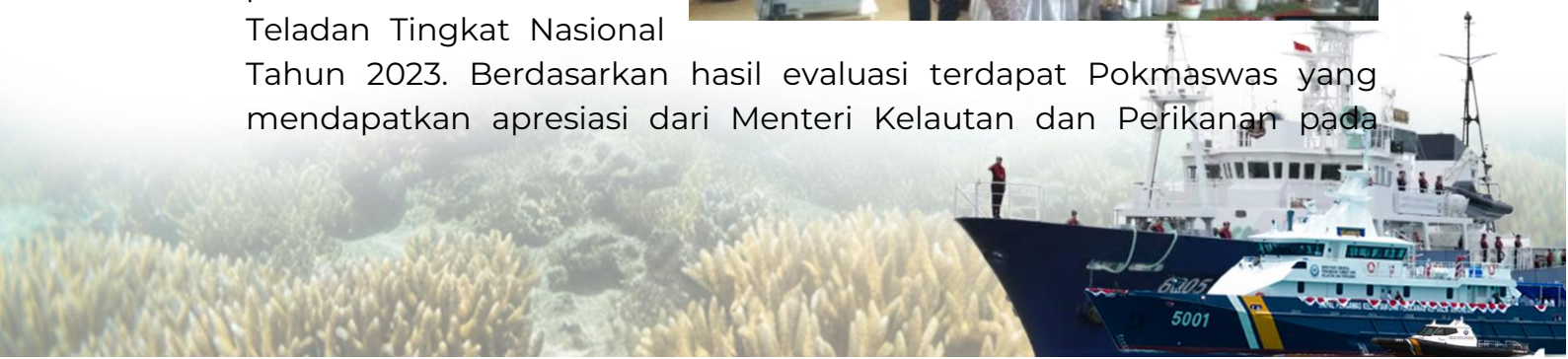
Gambar 3.2 Sosialisasi dan sinkronisasi penyadartahuan kepada Pokmaswas

- b. Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat di 55 (lima puluh lima) lokasi.

- c. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pokja Pembina dan Penilai Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023 untuk menyusun rencana pembinaan dan prosedur penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional



Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Pokmaswas yang mendapatkan apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada



gelaran Rapat Kerja Nasional KKP di Bali. Pokmaswas yang mendapatkan apresiasi yaitu Pokmaswas Petrando dari provinsi NTB, Pokmaswas Teluk Sumberkima dari provinsi Bali, Pokmaswas Panglima Tengkyu dari provinsi Kalimantan Utara, dan Pokmaswas MR – Pala dari provinsi Jawa Barat.



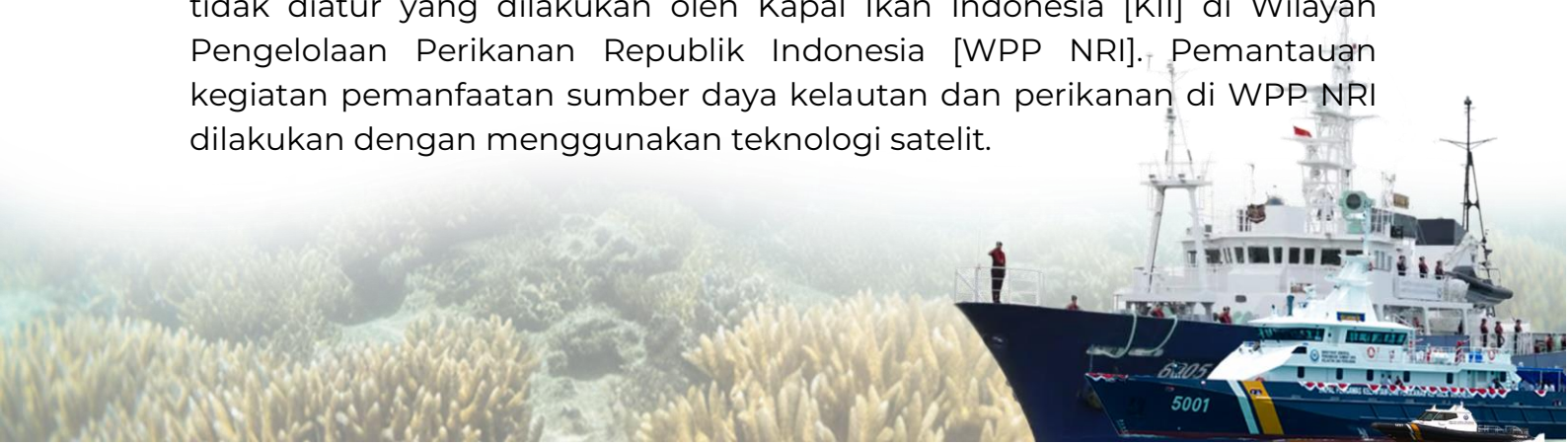
Gambar 3.3 Pemberian penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada POKMASWAS Berprestasi tahun 2023

## SASARAN PROGRAM 2 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN EFEKTIF

**IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	% Capaian thd target akhir Renstra
67,18	105,79%	101,79%	100%	100%	100	-	-

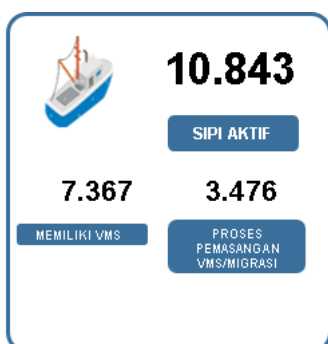
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing] yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.



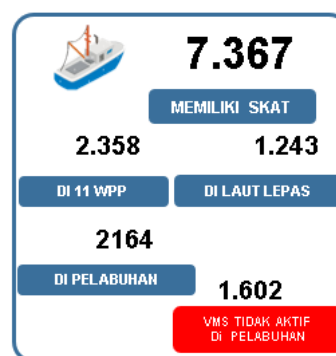
Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% atau 11 WPPNRI. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan formulasi perhitungan, termasuk dengan target jangka menengah/renstra tahun 2024.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diupayakan melalui konsistensi pemantauan terhadap aktivitas kapal-kapal di seluruh WPPNRI menggunakan citra satelit antara lain Automatic Identification System (AIS), Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pemantauan melalui pesawat patroli.

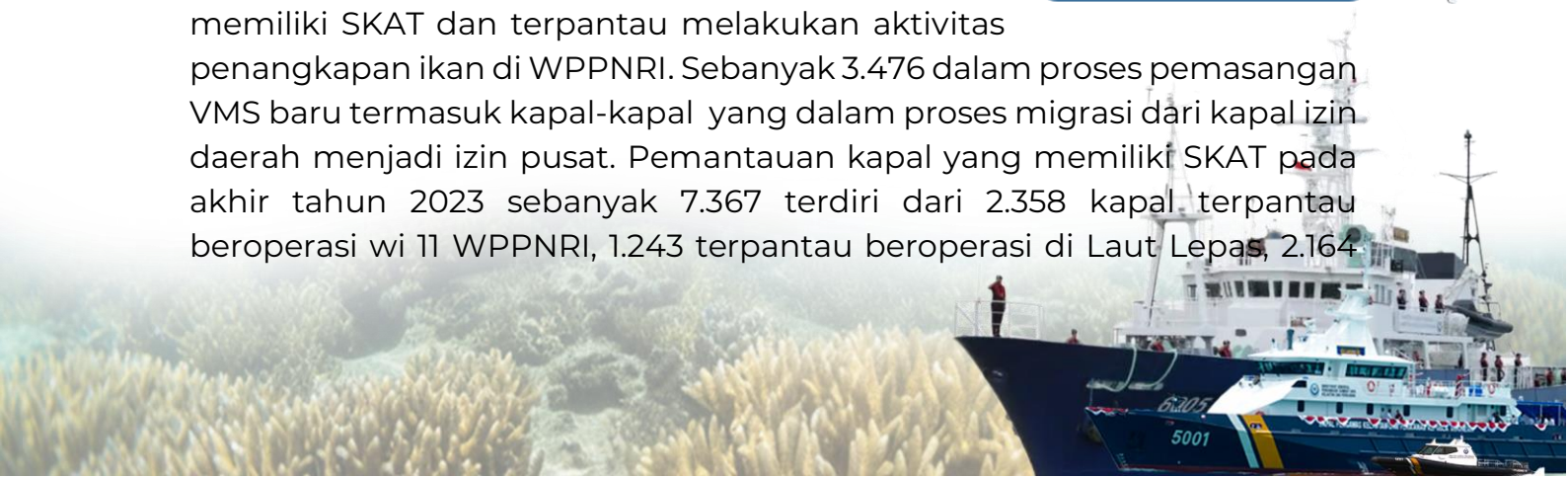
Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang di kapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia



serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP Tahun 2023, terpantau dari 10.843 SIPI yang aktif sebanyak 7.367 kapal telah



memiliki SKAT dan terpantau melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI. Sebanyak 3.476 dalam proses pemasangan VMS baru termasuk kapal-kapal yang dalam proses migrasi dari kapal izin daerah menjadi izin pusat. Pemantauan kapal yang memiliki SKAT pada akhir tahun 2023 sebanyak 7.367 terdiri dari 2.358 kapal terpantau beroperasi di 11 WPPNRI, 1.243 terpantau beroperasi di Laut Lepas, 2.164



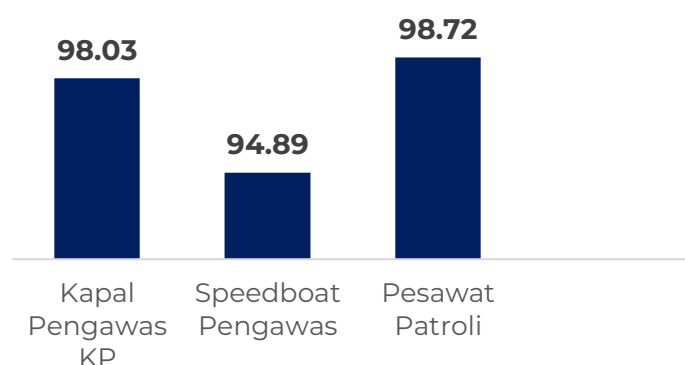


terpantau di pelabuhan dan 1.602 terpantau tidak mengaktifkan di Pelabuhan. Hasil pemantauan dilakukan analisis di Pusat Pengendalian didapati 1.683 kapal terindikasi pelanggaran.

#### IKU 4 Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89,4	97,21	108,74	-	-

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli.

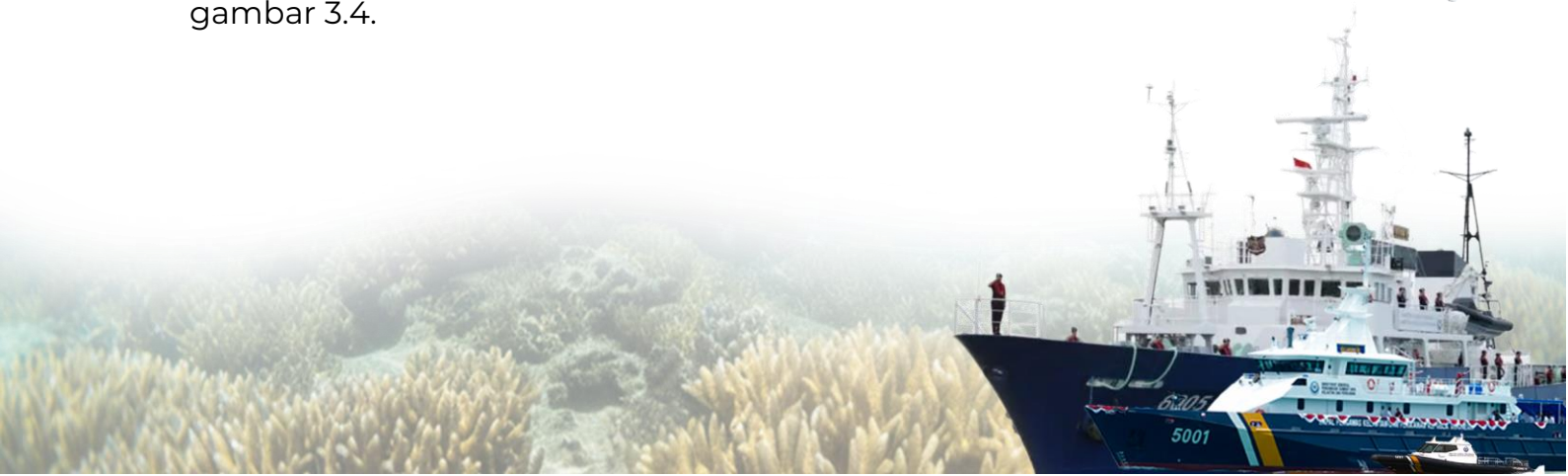


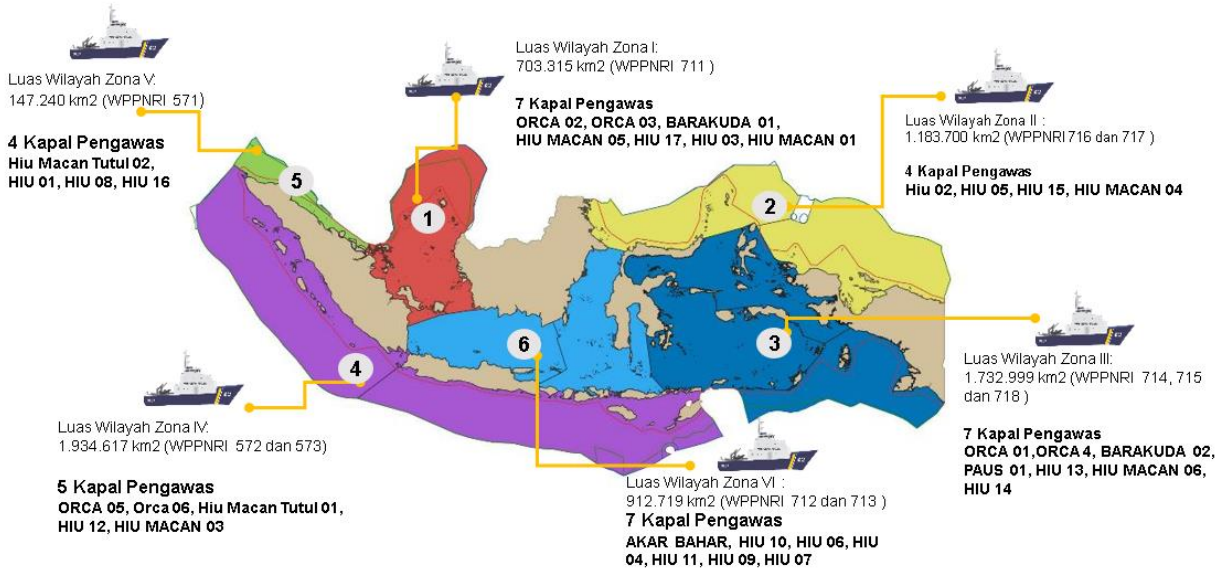
Faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan adalah komitmen dan konsistensi pengawasan kapal perikanan dilaut untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya dilakukan secara terus menerus adalah integrasi armada pengawasan khususnya pemantauan udara menggunakan pesawat kemudian intercept oleh Kapal Pengawas.

Kegiatan utama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

#### 1. Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Ditjen PSDKP memiliki 34 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan di laut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi di seluruh WPP RI yang tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia. Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada gambar 3.4.

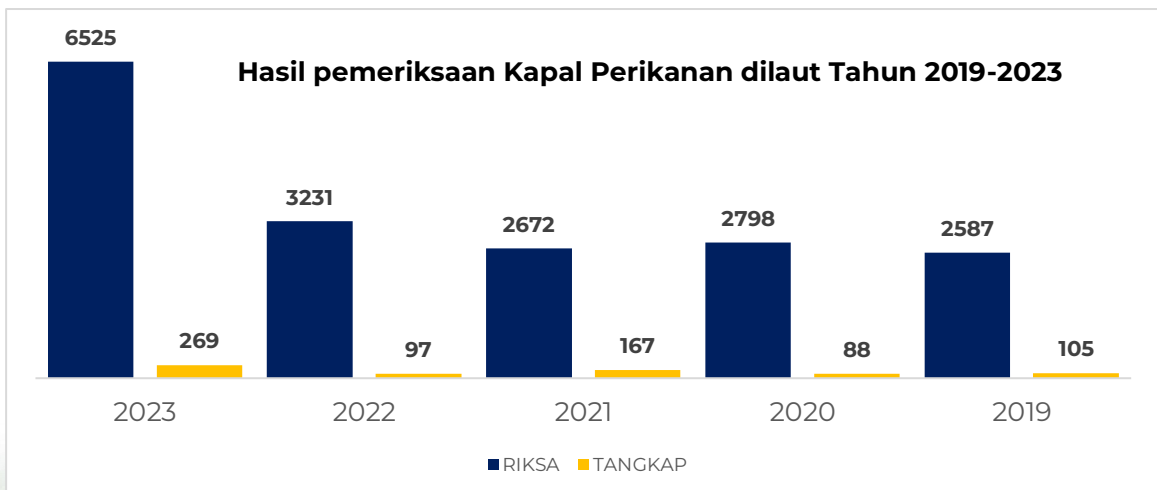
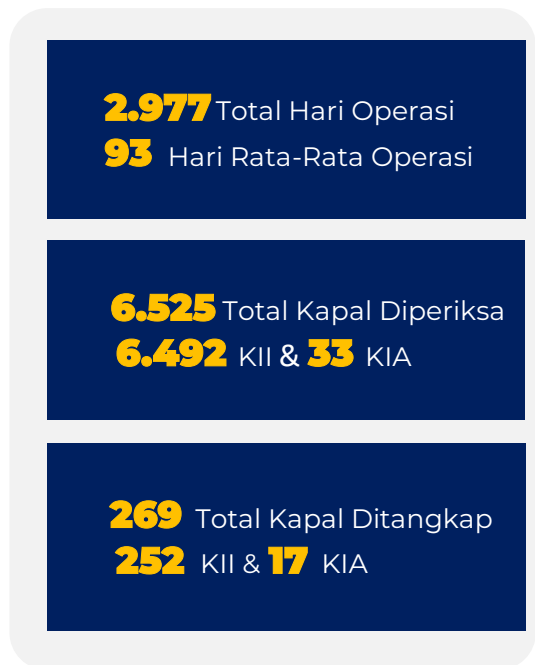




Gambar 3.4 Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Pada periode tahun 2023, rata-rata hari operasi 93 hari operasi dan berhasil memeriksa 6.525 Kapal terdiri dari 6.492 KII dan 33 KIA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 269 kapal terdiri dari 252 KII dan 17 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP.

Hasil pemeriksaan kapal perikanan dilaut tahun 2023 meningkat tajam dari tahun 2022 bahkan dari tahun 2019, termasuk jumlah kapal yang ditangkap. Kondisi dipengaruhi rata-rata hari operasi pada tahun 2023 meningkat 27 hari dari tahun 2022.



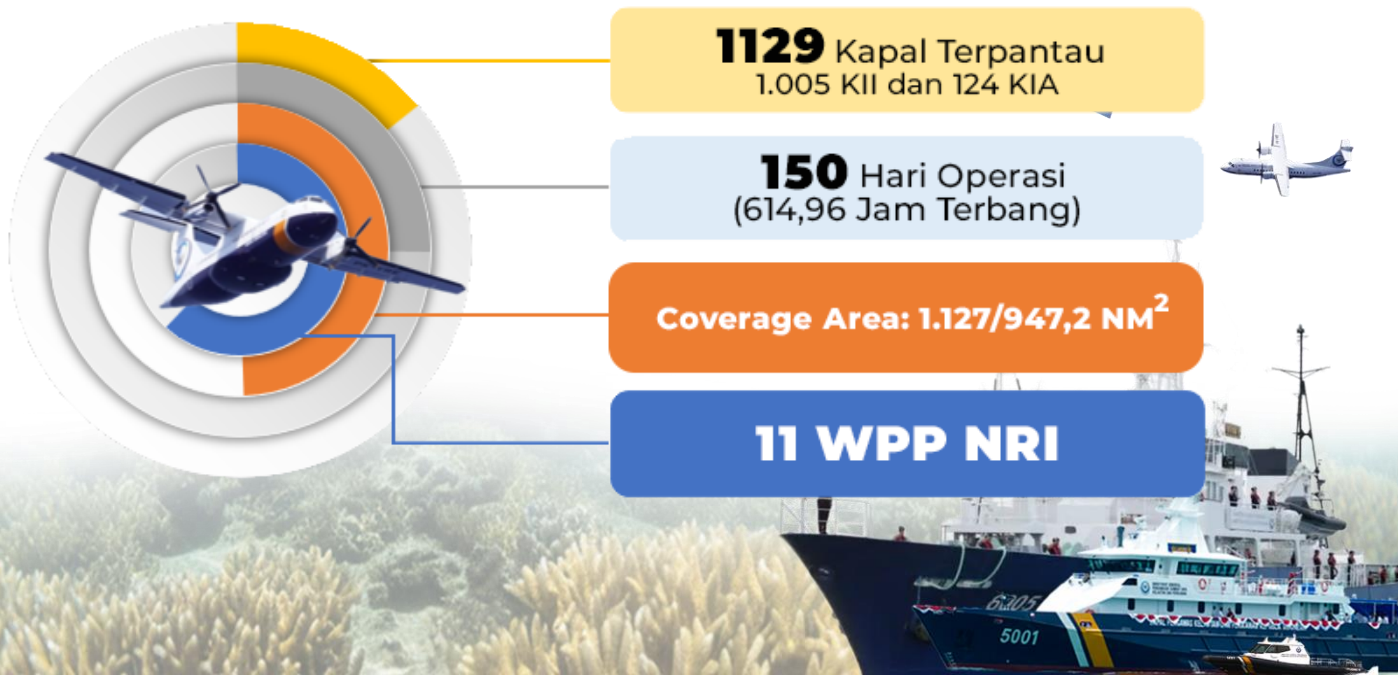
Kapal yang ditangkap tersebar di 11 WPPNRI, yang paling banyak ditangkap di WPPNRI 571 dan yang paling sedikit di WPPNRI 717.



## 2. Operasi Speedboat Pengawas

Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 unit speedboat pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat. Periode Tahun 2023, speedboat pengawas telah beroperasi sebanyak 30 hari operasi dari target 30 hari operasi tahun 2023. Telah memeriksa 4.886 kapal ikan Indonesia dan mengawasi WPPNRI seluas 47.849 NM<sup>2</sup>.

## 3. Operasi Pesawat Patroli



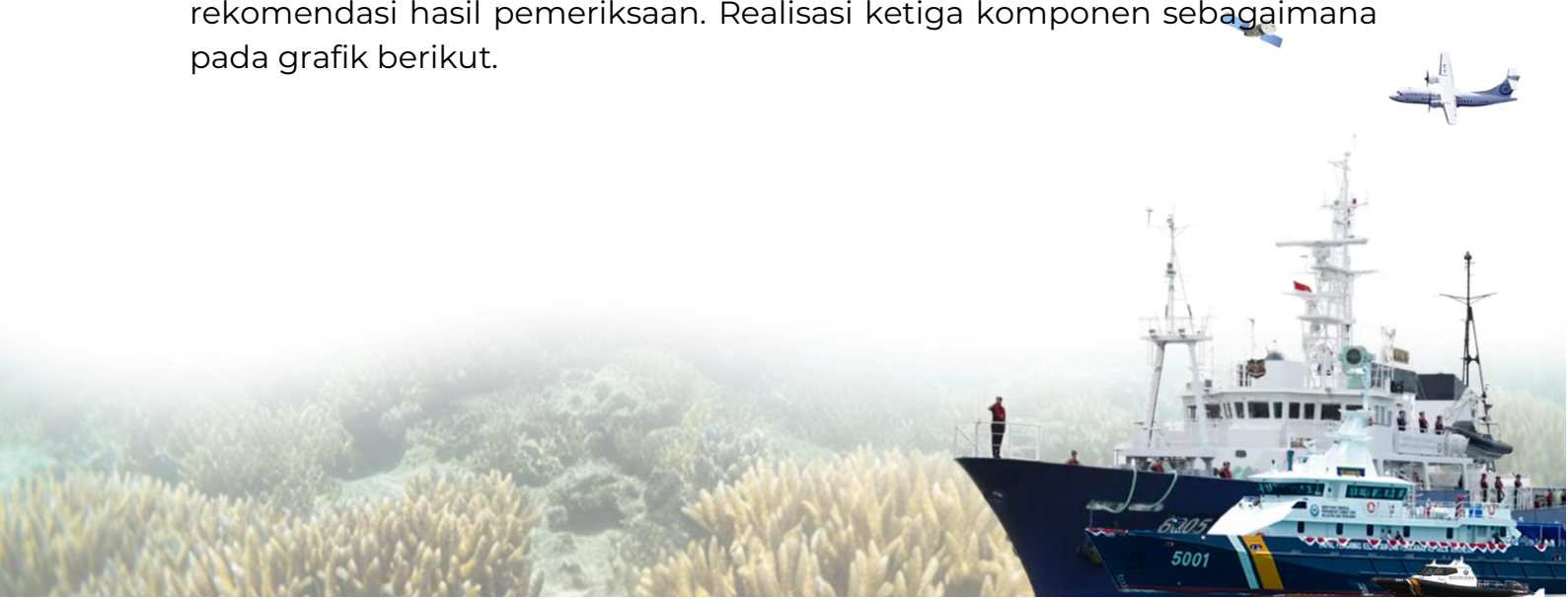
Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Maritime Patrol Aircraft ATR 42-320. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan selama 150 hari atau 31 periode yang meliputi di 11 WPPNRI yakni 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, dan 718 dengan hasil pemantauan sebanyak 1.129 kapal perikanan (1.005 kapal Indonesia dan 124 kapal ikan asing). Pemantauan terhadap 85 Lokasi Identifikasi Jenis & Posisi Rumpon atau Fishing Aggregating Device (FAD). 26 rumpon diantaranya berada di perbatasan, 59 rumpon berada di WPP 715 yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh kapal-kapal pengawas. Selain itu juga Operasi Pesawat telah memantau 8 Kawasan Konservasi yakni Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, KKPN Gili Trawangan, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai, KKPN Taman Wisata Perairan Laut Banda dan Laut Sawu.

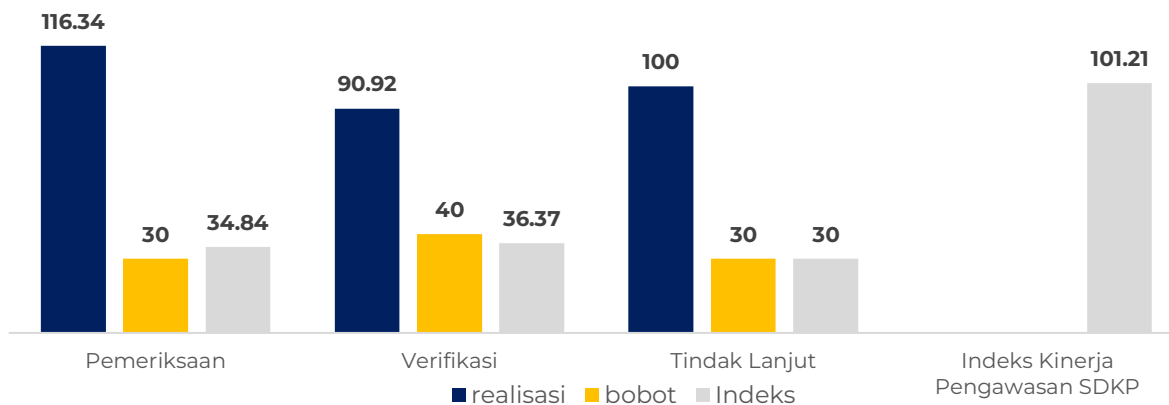


### IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	101,21	120,00	-	-

Realisasi indikator kinerja sebesar 101,21% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% disebabkan faktor jumlah pemeriksaan pelaku usaha melebihi target yang ditetapkan. Penghitungan kinerjanya ini ditentukan oleh 3 (tiga) komponen yaitu pemeriksaan pelaku usaha KP, verifikasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Realisasi ketiga komponen sebagaimana pada grafik berikut.



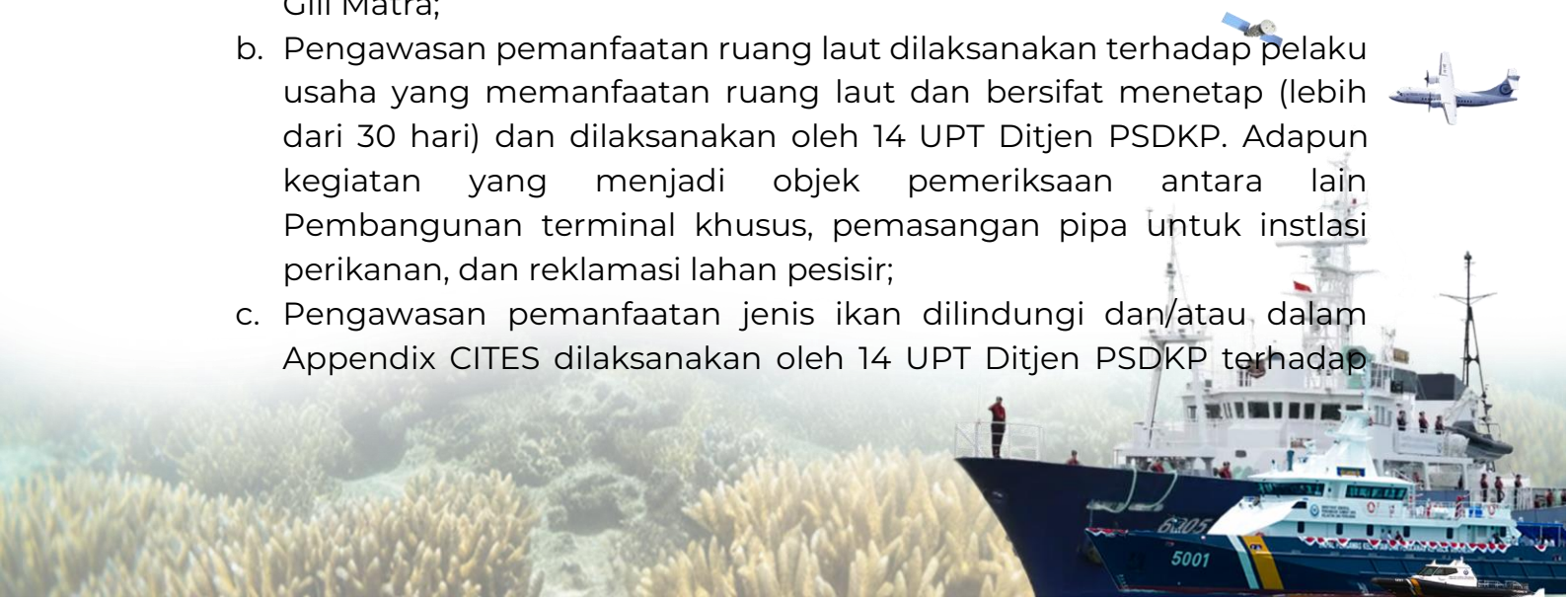


## 1. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Ditjen PSDKP telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.167 pelaku usaha bidang kelautan dari target pemeriksaan 781 pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K yang tersebar di 14 UPT PSDKP. Pengawasan dimaksud dilakukan terhadap objek pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

OBYEK PENGAWASAN	DIPERIKSA
Kawasan Konservasi Nasional	112
Pemanfaatan Ruang Laut	95
Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau CITES	99
Jasa dan Produk Kelautan	85
Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	106
<i>Destructive Fishing</i>	493
Pencemaran Perairan	177
<b>Total</b>	<b>1.167</b>

- a. Pengawasan kawasan konservasi dilaksanakan di 10 Kawasan Konservasi Nasional yaitu TWP Pieh, TWP Anambas, TNP Laut Sawu, TWP Padaido, TWP Laut Banda, SAP Aru Bagian Tenggara, SAP Waigeo Sebelah Barat, TWP Kapoposang, SAP Raja Ampat dan TWP Gili Matra;
- b. Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan bersifat menetap (lebih dari 30 hari) dan dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP. Adapun kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan antara lain Pembangunan terminal khusus, pemasangan pipa untuk instalasi perikanan, dan reklamasi lahan pesisir;
- c. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dalam Appendix CITES dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP terhadap

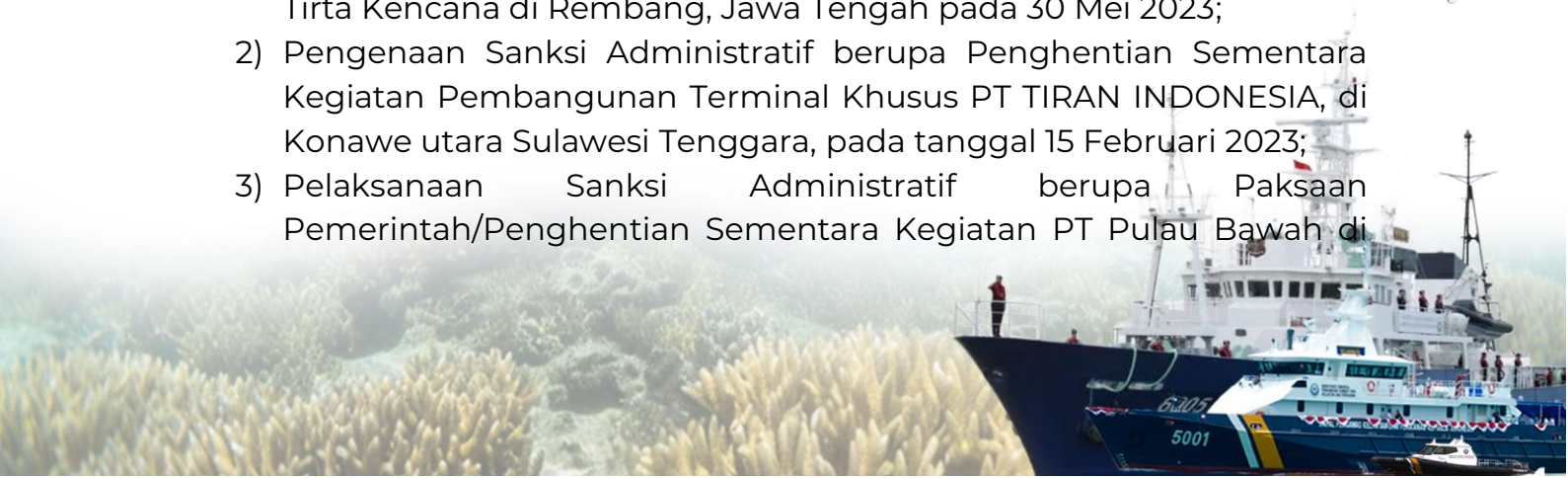


para pemanfaat jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Appendix yang memiliki perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut. Pengawasan juga dilaksanakan terhadap potensi pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi penuh dan dilarang dimanfaatkan;

- d. Pengawasan jasa dan produk kelautan dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha wisata tirta lainnya dan garam;
- e. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP. Pengawasan pemanfaatan pesisir dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir khususnya untuk kegiatan reklamasi. Sedangkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, diantaranya untuk kegiatan resort dan reklamasi;
- f. Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP terhadap kapal perikanan berskala kurang dari 10 *grosston*. Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan muatan kapal untuk mengetahui apakah terdapat muatan yang berpotensi digunakan untuk menangkap ikan dengan cara merusak menggunakan bom, setrum dan racun;
- g. Pengawasan pencemaran perairan dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan dilaksanakan oleh 14 UPT Ditjen PSDKP. Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen perizinan lingkungan dan pelaksanaan pencegahan pencemaran khususnya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Pengenaan sanksi administratif, telah dilaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penyegelan karena tidak memiliki dokumen izin reklamasi dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut diantaranya Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan *breakwater* yang tidak memiliki KKPRL dan izin reklamasi terhadap PT Bumi Rejo Tirta Kencana di Rembang, Jawa Tengah pada 30 Mei 2023;
- 2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus PT TIRAN INDONESIA, di Konawe utara Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 Februari 2023;
- 3) Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah/Penghentian Sementara Kegiatan PT Pulau Bawah di



- Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 10 Maret 2023;
- 4) Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan PT Baoshuo Taman Industry Investment (BTII) di Kab. Morowali Sulteng, pada tanggal 16 Maret 2023;
  - 5) Penerapan Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah (penyegeelan) hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan terkait Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah pesisir Batam Kepulauan Riau Milik PT BSSTEC dan PT MPP;
  - 6) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan denda adminsitratif pada bulan Oktober 2023 terhadap 3 kapal yang melakukan kegiatan pemanfaatan sedimen di perairan Riau;
  - 7) Penegakan hukum terhdap 61 orang nelayan yang melakukan kegiatan *destructive fihing* pada tahun 2023
  - 8) Pada bulan April dan September 2023, dilakukan komunikasi intensif dan penerbitan 7 surat teguran terhadap penyedia racun dan alat setrum di *e-commerce* untuk mencegah adanya transaksi penjualan, mengingat keduanya seringkali digunakan untuk *destructive fishing*. Pada bulan Spetember 2023, ketujuh pihak sudah melakukan *take down* atas iklan penjualan racun dan setrum.

## 2. Pemeriksaan pelaku Usaha Perikanan

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator kinerja dari prosentase penyelesaian verifikasi hasil perikanan pelaku usaha perikanan dari a)pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS (Shorlist dari BKPM) b)pengawasan penangkapan pasca produksi dari hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha kapal perikanan yang apabila permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi c)pengawasan program prioritas nasional budidaya d)pengawasan importasi hasil perikanan.



**1626**  
Kapal Perikanan



**364**  
Usaha Budidaya Ikan



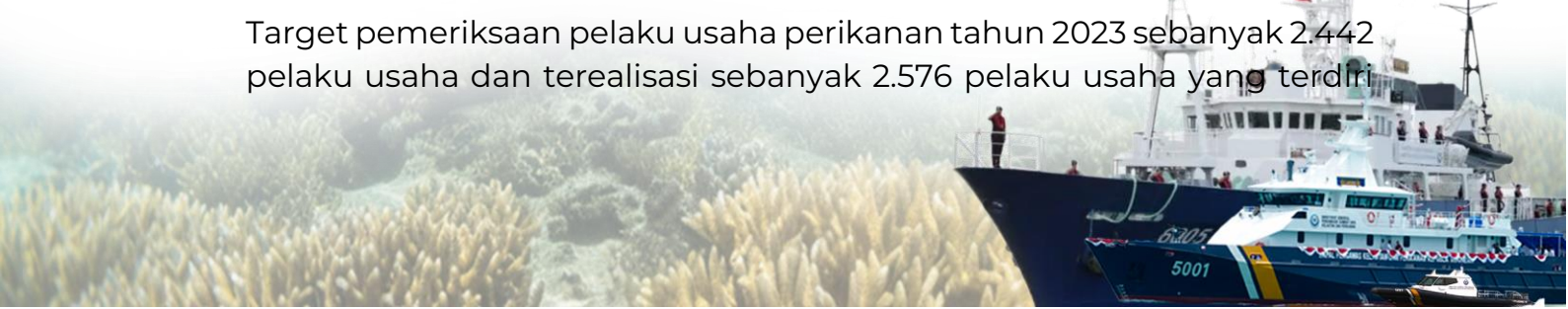
**268**  
Usaha  
Pengolahan Ikan



**318**  
Distribusi  
Hasil Perikanan



Target pemeriksaan pelaku usaha perikanan tahun 2023 sebanyak 2.442 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 2.576 pelaku usaha yang terdiri



dari 1.024 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 1.552 pelaku usaha berasal dari Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Pasca Produksi. Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh pengawas perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak, sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Hasil pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan berbasis risiko**

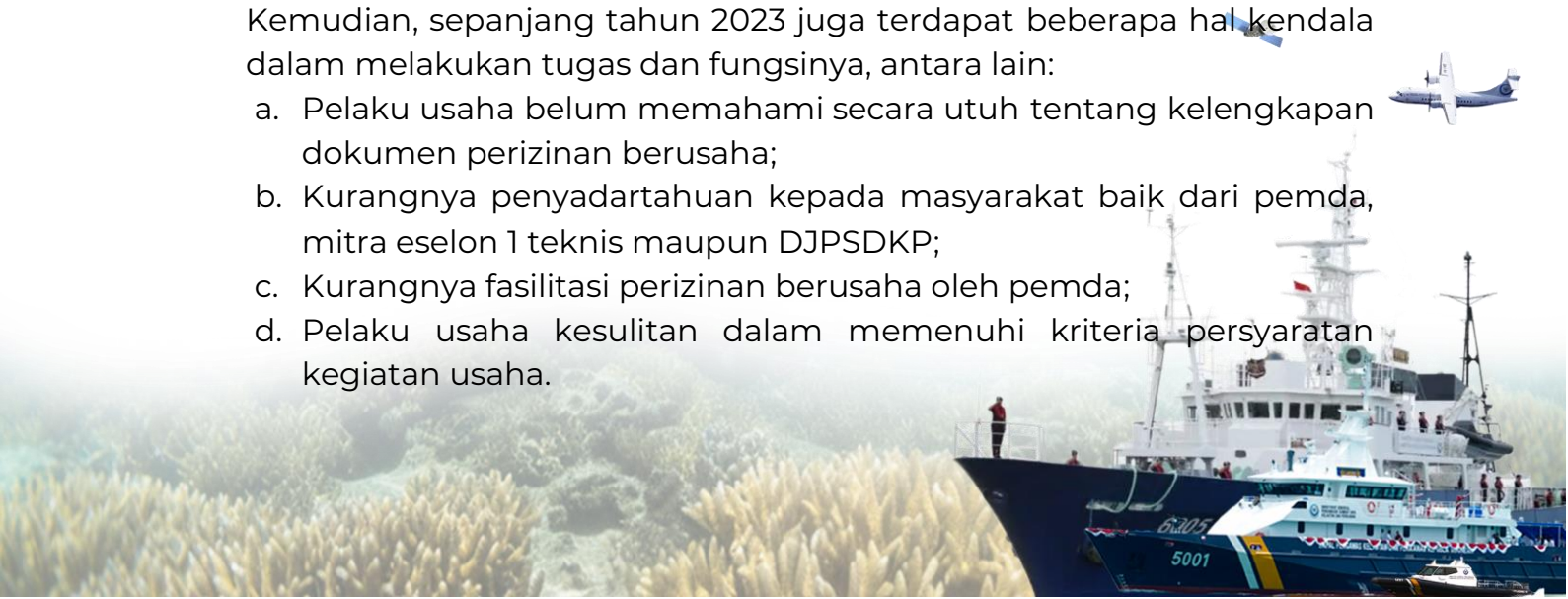
No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
1	Lampulo	19
2	Batam	91
3	Benoa	98
4	Bitung	84
5	Jakarta	264
6	Tual	95
7	Ambon	28
8	Belawan	44
9	Biak	2
10	Cilacap	210
11	Kupang	8
12	Pontianak	55
13	Tahuna	4
14	Tarakan	22
	<b>Jumlah</b>	<b>1.024</b>

Beberapa faktor yang mendukung kepatuhan pelaku usaha perikanan, di antaranya:

- Pemberitahuan sebelum dilaksanakan pengawasan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan;
- Frekuensi pengawasan yang terjadwal atau rutin;
- Payung hukum sudah tersedia (juknis tata cara pengawasan, sanksi administratif, pengawasan LKR, dll);
- Form pengawasan dan BAP terstandarisasi;
- Pengenaan sanksi administratif sesuai prosedur;
- Denda administratif yang dihindari pelaku usaha ;

Kemudian, sepanjang tahun 2023 juga terdapat beberapa hal kendala dalam melakukan tugas dan fungsinya, antara lain:

- Pelaku usaha belum memahami secara utuh tentang kelengkapan dokumen perizinan berusaha;
- Kurangnya penyadartahuan kepada masyarakat baik dari pemda, mitra eselon 1 teknis maupun DJPSDKP;
- Kurangnya fasilitasi perizinan berusaha oleh pemda;
- Pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi kriteria persyaratan kegiatan usaha.





Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Tahun 2023, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- a. Menelaah dan menyusun rencana jadwal pemeriksaan pelaku usaha perikanan lebih baik;
- b. Penyadartahuan kepada pelaku usaha melalui pembinaan/perbaikan; pengenaan sanksi ataupun sosialisasi aturan;
- c. Peningkatan kompetensi pengawas perikanan melalui bimtek, diklat, seminar, webinar, dll
- d. Peningkatan kelembagaan pengawasan di daerah.

### **IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP**

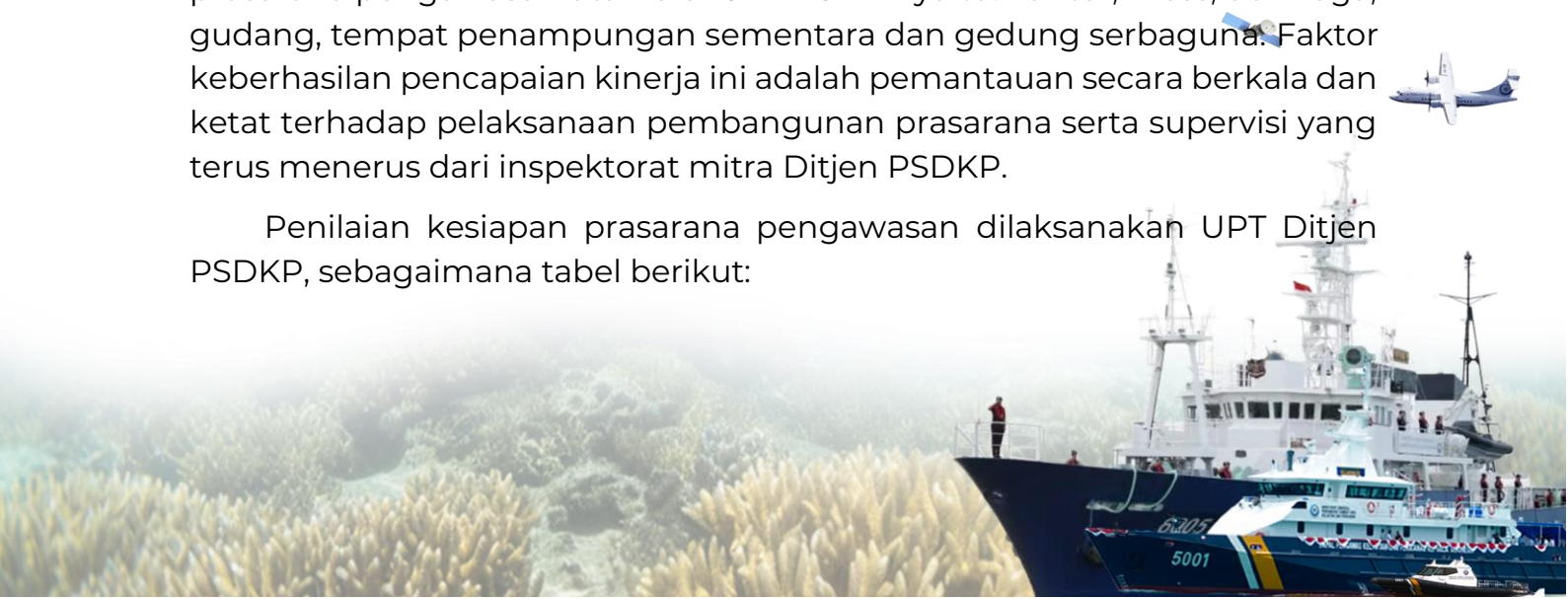
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	96,05	120,00	-	-

Indeks Kinerja Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP adalah ukuran sejauh mana kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Indeks Kinerja Kesiapan Sarana Pengawasan SDKP merupakan ukuran kesiapan kapal pengawas, sementara itu Indeks Kinerja Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP merupakan ukuran kesiapan bangunan pengawasan utama di UPT PSDKP yaitu kantor, mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara dan Gedung serbaguna.

Capaian Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 96,05 diperoleh dari kesiapan sarana sebesar 92,85 dan kesiapan prasarana sebesar 99,25. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan, demikian pula halnya dengan target Renstra 2020-2024.

Penilaian Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi prasarana pengawasan utama di UPT PSDKP yaitu: kantor, mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara dan gedung serbaguna. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah pemantauan secara berkala dan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana serta supervisi yang terus menerus dari inspektorat mitra Ditjen PSDKP.

Penilaian kesiapan prasarana pengawasan dilaksanakan UPT Ditjen PSDKP, sebagaimana tabel berikut:



## Realisasi Nilai Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2023

NO	Jenis Prasarana	Triwulan I			Triwulan II				Triwulan III			Triwulan IV			Rata-rata	Bobot	Indeks		
		Lampulo	Batam	Jakarta	Benoa	Bitung	Cilacap	Belawan	Pontianak	Tual	Tarakan	Kupang	Tahuna	Ambon				Biak	
1	Kantor	100	96,88	100	100	100	100	96,43	100	100	96,9	100	84,60	95,40	100	100	30	30,00	
2	Mess	100	100			100		91,88	100	100		100	78,01		100	100	25	25,00	
3	Dermaga		100			100			87,5	87,5						100	20	20,00	
4	Gudang		100			100		95,83		100						100	10	10,00	
5	DTC	100	78			100		91,67	87,5		100	97	93,46			95	10	9,50	
6	Serbaguna					95										95	5	4,75	
<b>Total</b>																			<b>99,25</b>

### Pembangunan Kantor PSDKP Makasar



Pengelola : PSDKP Bitung  
 Nilai kontrak : Rp1,28 M  
 Masa Kerja : 27 April - 26 Sept 2023  
 Status Pekerjaan : Selesai 100%

### Pembangunan Kantor PSDKP Maumere



Pengelola : PSDKP Kupang  
 Nilai kontrak : Rp675 Juta  
 Masa Kerja : 9 Agt - 6 Des 2023  
 Status Pekerjaan : Selesai 100%

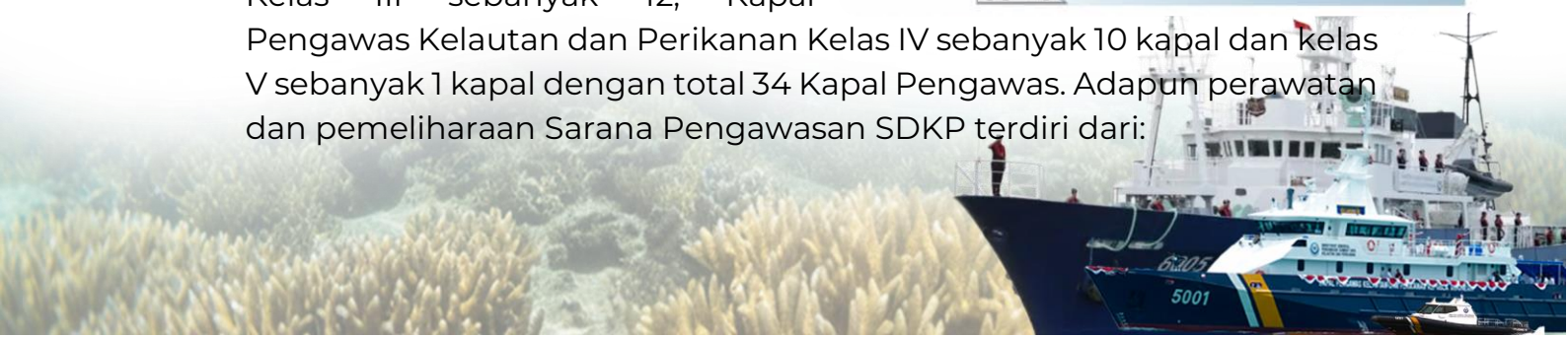
### Pembangunan Kantor PSDKP Belawan Tahap 1



Pengelola : PSDKP Belawan  
 Nilai kontrak : Rp2,29 M  
 Masa Kerja : 1 Nov - 30 Des 2023  
 Status Pekerjaan : Selesai 100% (60% sesuai kontrak)

Kesiapan sarana pengawasan SDKP berasal dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga sarana pengawasan laik operasi. Kesiapan sarana pengawasan meliputi Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan Kelas I sebanyak 6 Kapal, Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan Kelas II sebanyak 5 kapal, Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan Kelas III sebanyak 12, Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Kelas IV sebanyak 10 kapal dan kelas V sebanyak 1 kapal dengan total 34 Kapal Pengawas. Adapun perawatan dan pemeliharaan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:

	Kelas I	KP Orca 01 KP Orca 02 KP Orca 03	KP Orca 04 KP Orca 05 KP Orca 06	<b>6</b>
	Kelas II	KP Hiu Macan Tutul 01 KP Paus 001	KP Hiu Macan Tutul 02 KP Barakuda 01 KP Barakuda 02	<b>5</b>
	Kelas III	KP Hiu Macan 001 KP Hiu Macan 003 KP Hiu Macan 004 KP Hiu Macan 005	KP Hiu 12 KP Hiu 13 KP Hiu 14 KP Hiu 15 KP Hiu Macan 006 KP Hiu 16 KP Hiu 17	<b>12</b>
	Kelas IV	KP Hiu 001 KP Hiu 002 KP Hiu 003 KP Hiu 004 KP Hiu 005	KP Hiu 006 KP Hiu 007 KP Hiu 008 KP Hiu 009 KP Hiu 010	<b>10</b>
	Kelas V	KP Akar Bahar 001		<b>1</b>



- a) Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*),
- b) Perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan
- c) Perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pemeliharaan dan perawatan pencegahan meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin, pengedokan atau pelimbugan, servis, analisis teknis, pengecekan. Sementara itu, pemeliharaan dan perawatan prediktif berupa pengadaan Suku Cadang (*Spare Parts*) Kapal Pengawas dan pengadaan perlengkapan dan peralatan Kapal. Pemeliharaan dan perawatan darurat dilaksanakan dalam rangka menangani/ memperbaiki kerusakan atau masalah teknis yang terjadi di atas kapal pengawas akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*).

### SASARAN PROGRAM 3

#### PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

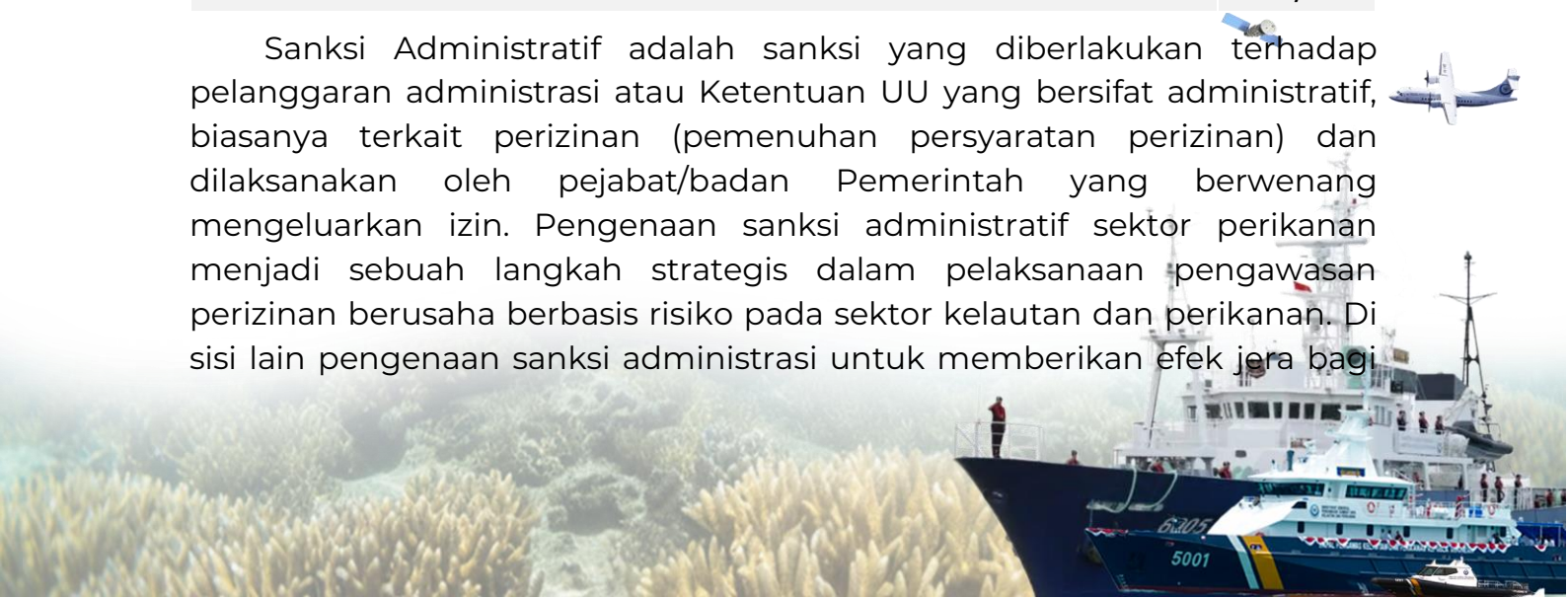
#### **IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% thd	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	95,72	119,65	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran Administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil pengenaan sanksi administratif dan kesesuaian penerapan sanksi administratif sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	93,89	70%	65,72
Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif Dengan Peraturan Perundang –Undangan	100	30%	30
			<b>95,72</b>

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain pengenaan sanksi administrasi untuk memberikan efek jera bagi



pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan adalah kemampuan SDM yang memutuskan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan. Adapun tahapan pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:

- a) Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b) Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- c) Pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- d) Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah dengan melaksanakan proses pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 sebanyak 1.177 pelanggaran. Berikut penyelesaian pengenaan sanksi administratif tahun 2023.

**Tabel 3.5. Penyelesaian Penanganan Sanksi Administratif 2023**

Bidang	Jumlah Kasus	Sanksi Adminsitratif			Keterangan
		SP1	SP2	Denda	
<b>PengeloLaan Sumber Daya Kelautan</b>	51	7	0	44	16 dari 44 kasus yang dikenakan denda juga diberikan paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan
<b>Pengeloaan Sumber Daya Perikanan</b>	1.126	785	243	150	- 327 kasus hasil operasi pengawasan - 799 kasus hasil analisis SPKP
<b>Jumlah</b>	<b>1.177</b>	<b>792</b>	<b>243</b>	<b>194</b>	



## SASARAN PROGRAM 4 PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

### **IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	93,44	108,65	-	-

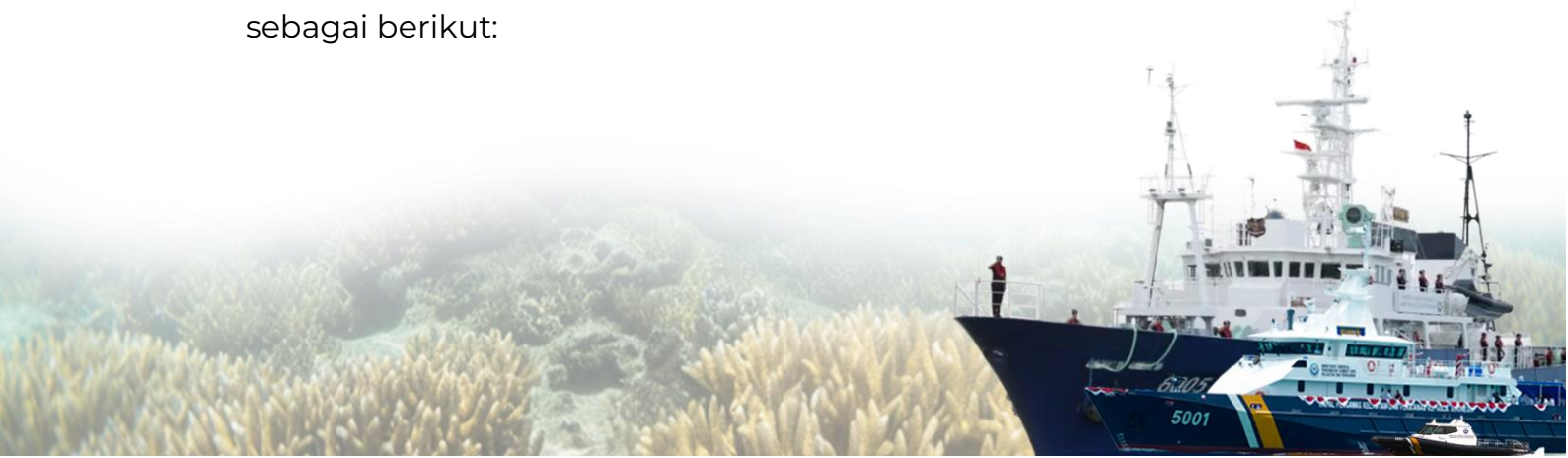
Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penyelesaian penyidikan dan kualitas penyidikan sebagai berikut:

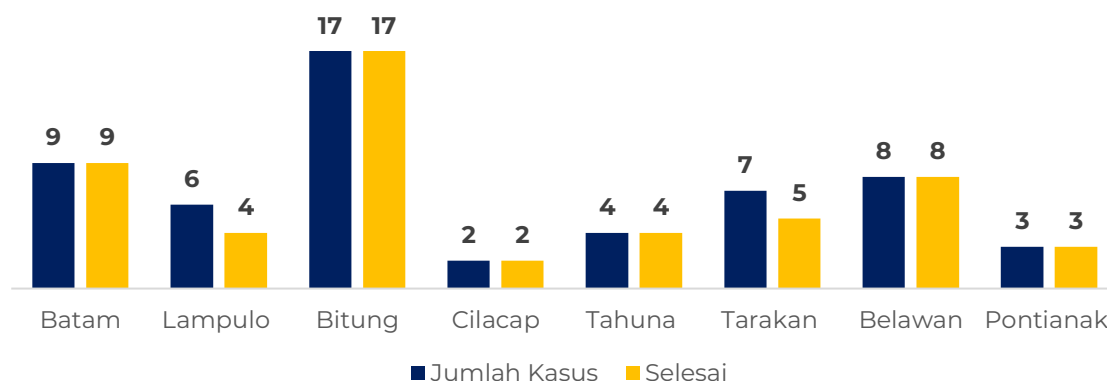
Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	92,86	70%	65,00
Indeks kualitas penanganan Bidang Kelautan dan Perikanan	94,81	30%	28,44
			<b>93,44</b>

Tercapainya kinerja ini melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh keberhasilan PPNS Perikanan Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan proses hukum tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai dengan watau yang ditetapkan. Selain itu, supervisi yang dilaksanakan terhadap kasus-kasus yang sedang diproses oleh PPNS Perikanan juga memberikan dampak yang sangat baik dalam penyelesaian kasus, penanganan barang bukti dan penanganan awak kapal. Kegiatan utama yang dilaksanakan sebagai upaya pencapaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penyelesaian penyidikan TPKP**

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2023 ini sebesar 92,86%, diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 56 kasus dengan jumlah kasus yang sudah selesai 52. Penanganan kasus tersebar di 8 (delapan) UPT PSDKP, sebagai berikut:





Penanganan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2023, penanganan kasus terbanyak terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Di dalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan bahan peledak (*destructive fishing*) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

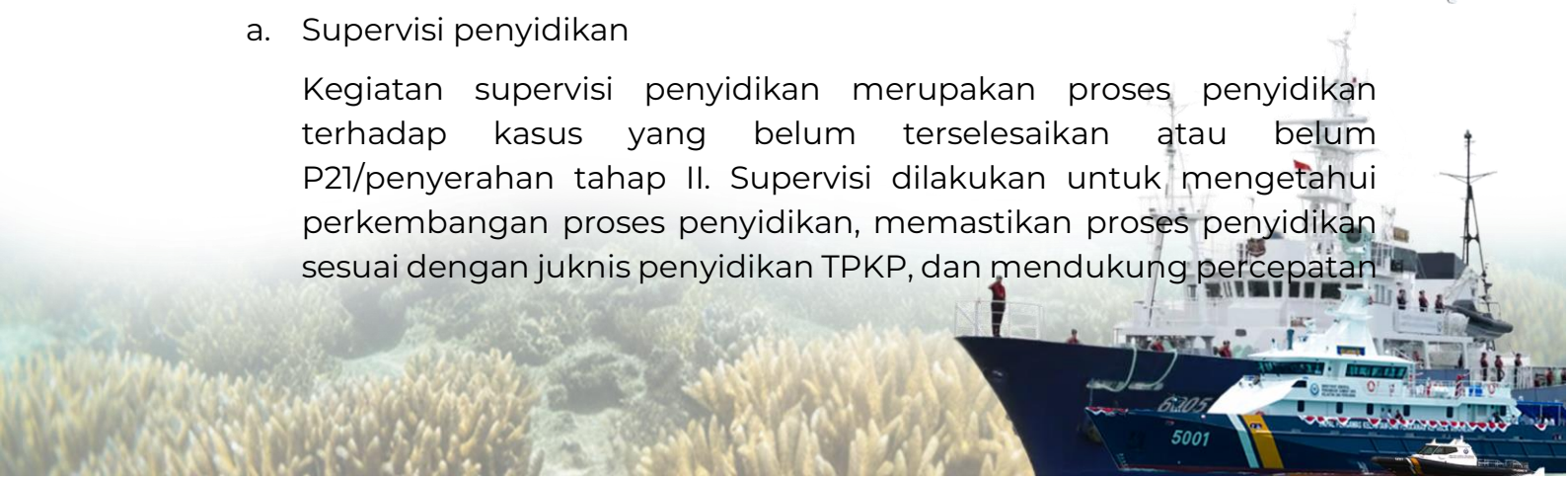
## 2. Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks perkasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada tahun 2023 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan, persentase supervisi penanganan barang bukti, dan persentase supervisi penanganan awak kapal. Uraian penjelasan sebagai berikut:

### a. Supervisi penyidikan

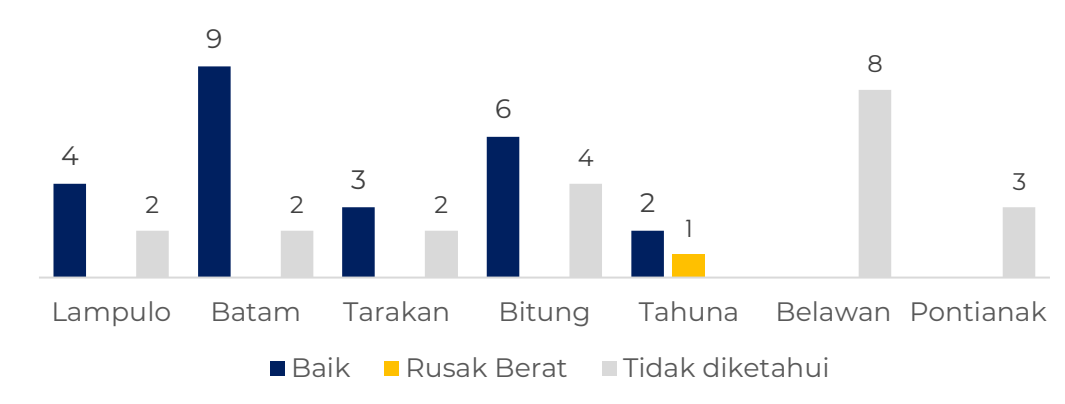
Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan



penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 54 kasus dari total 56 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 34 kasus dan kelautan 20 kasus. Hasil supervisi menunjukkan progress positif yaitu jumlah kasus yang inkraht sebanyak 46 kasus, 2 proses penyidikan, 3 kasus P-21, 2 kasus kasasi dan 1 kasus Banding.

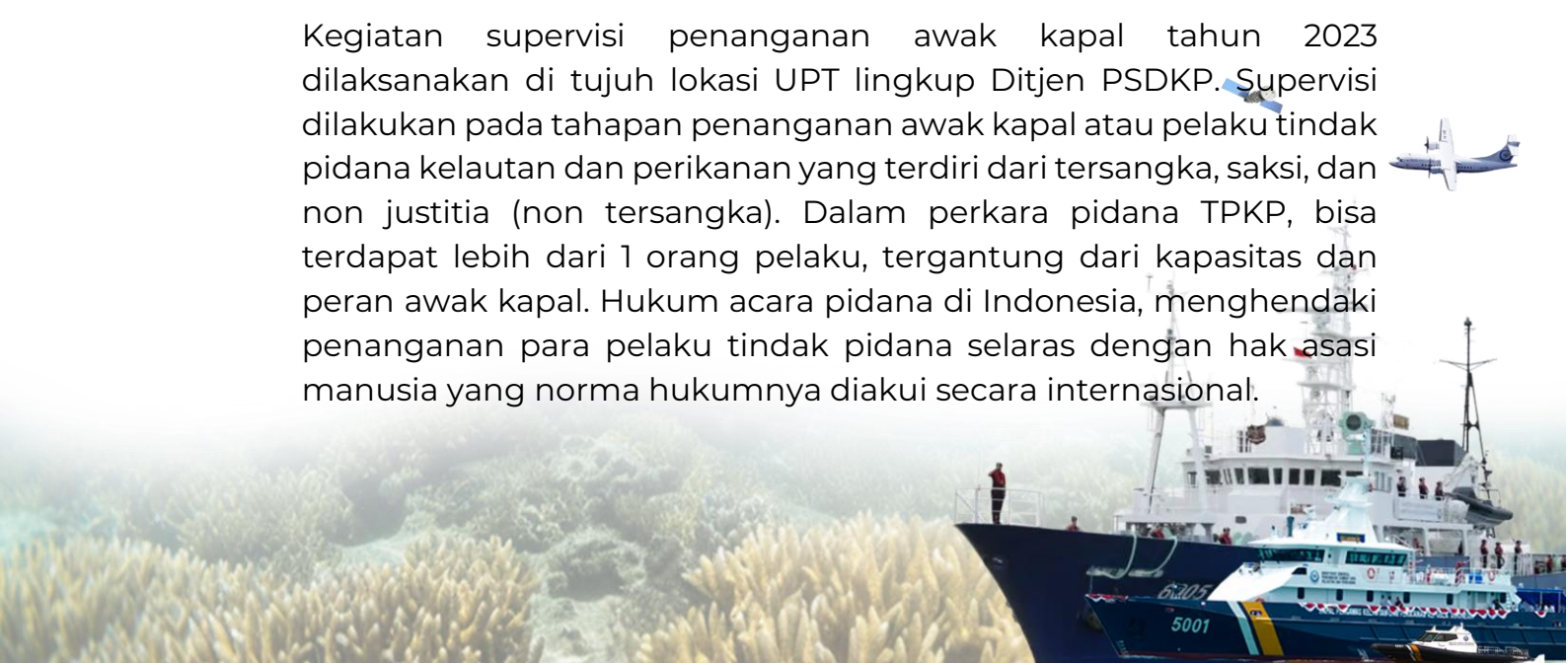
b. Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan pada tujuh lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani tahun 2023 yaitu sebanyak 42 unit dengan kondisi 24 unit Baik, 1 unit rusak berat dan 17 unit tidak diketahui. Penanganan barang bukti tersebar di beberapa UPT PSDKP sebagaimana berikut:



c. Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal tahun 2023 dilaksanakan di tujuh lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional.

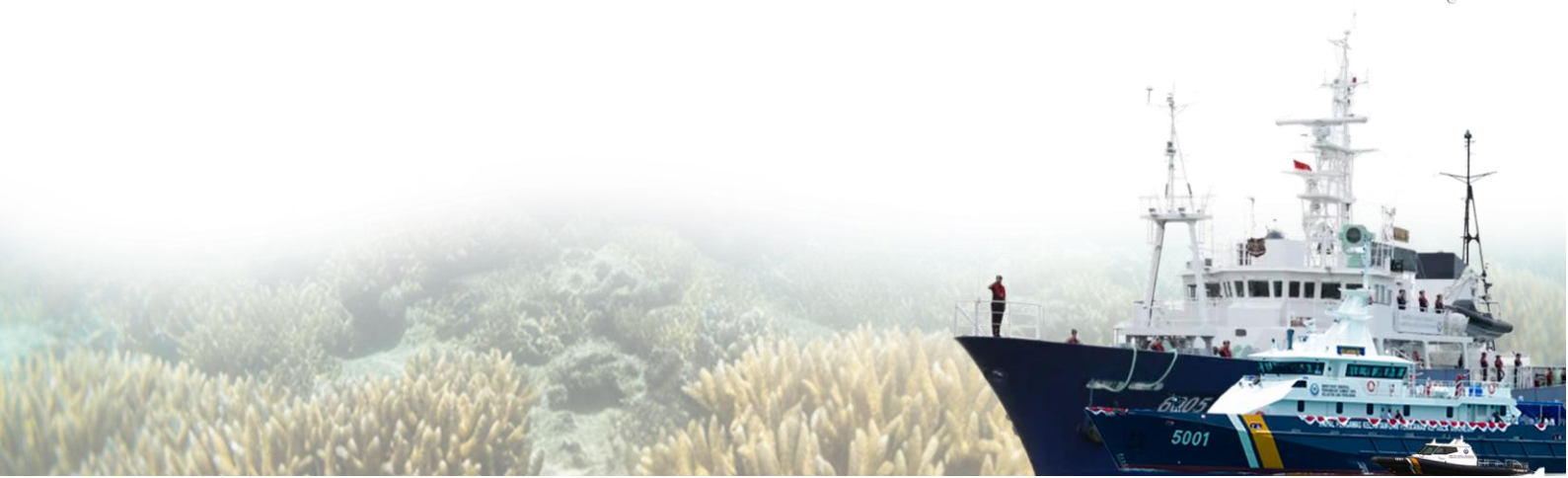


Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani tahun 2023 yaitu sebanyak 270 awak kapal yang masuk dalam proses hukum, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Data penanganan awak kapal perikanan yang ditangani tahun 2023**

No	UPT yang menangani	Jumlah kasus	Jumlah awak kapal yang ditangani	Warga Negara
1	Lampulo	14	27	27 orang WNI
2	Batam	9	101	1 orang warga negara Laos 100 orang warga negara Vietnam
3	Bitung	17	35	13 orang warga negara Filipina 22 orang WNI
4	Belawan	8	37	15 orang warga negara Myanmar 4 orang warga negara Kamboja 5 orang warga negara Thailand 13 orang WNI
5	Pontianak	3	5	5 orang WNI
6	Tahuna	7	21	5 orang WNI 16 orang warga negara Filipina
7	Tarakan	7	44	3 orang warga negara Malaysia 41 orang WNI
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>270</b>	





## SASARAN PROGRAM 5 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

### **IKM 9 Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP**

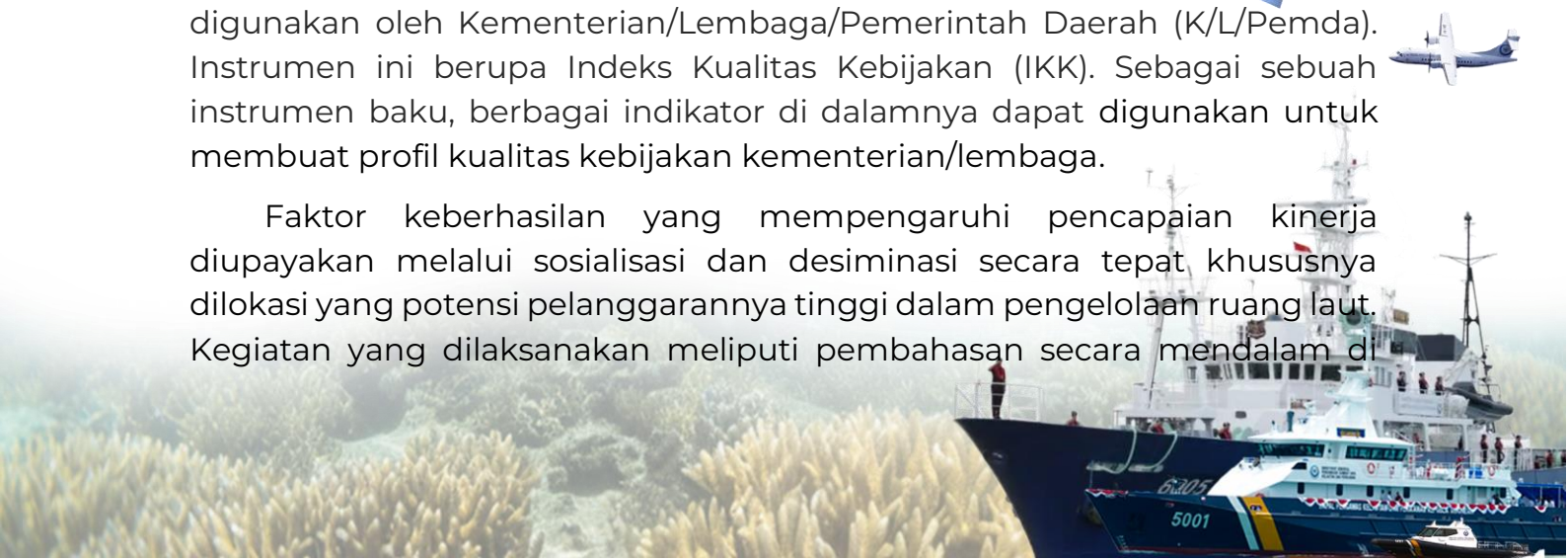
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	74,8	77,56	70	75,76	108,23	-	-

Pada tahun 2023 ditargetkan nilai indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70 terealisasi sebesar 75,76 dari penghitungan indeks efektifitas kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Peraturan perundang-undangan yang dikaji merupakan salah satu peraturan Menteri KP yang tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2021 tentang Program Penyusunan (Prosun) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP tahun 2021.

Amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk dapat mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan di instansi melalui berbagai inisiatif. Guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Indonesia, diperlukan sebuah instrumen penilaian yang berlaku nasional dan dapat dengan mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Instrumen ini berupa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Sebagai sebuah instrumen baku, berbagai indikator di dalamnya dapat digunakan untuk membuat profil kualitas kebijakan kementerian/lembaga.

Faktor keberhasilan yang mempengaruhi pencapaian kinerja diupayakan melalui sosialisasi dan desiminasi secara tepat khususnya dilokasi yang potensi pelanggarannya tinggi dalam pengelolaan ruang laut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembahasan secara mendalam di



lingkup Ditjen PSDKP, penetapan lokasi sosialisasi dan desiminasi serta pelaksanaannya.

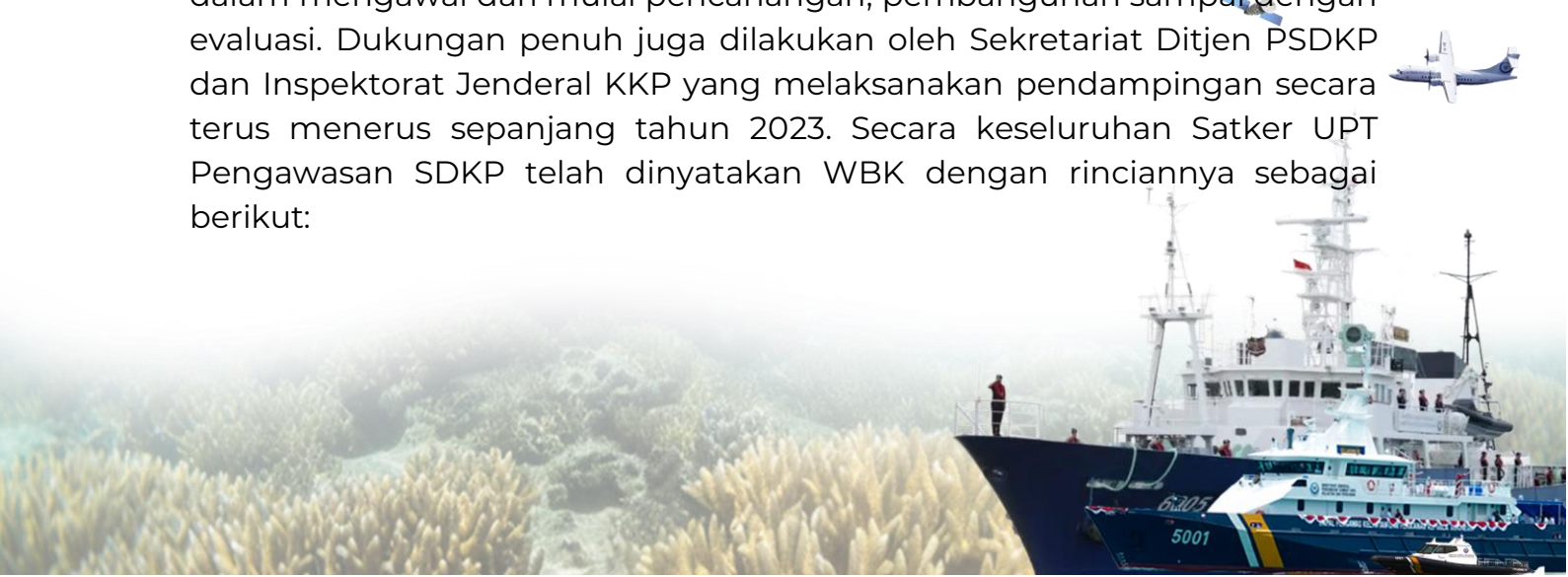
Namun demikian, belum terdapat inovasi dan/atau alternatif maupun analisis risiko dalam penyusunan kebijakan serta ketiadaan riset maupun uji coba/piloting untuk dasar pengambilan kebijakan. Selanjutnya untuk aspek monitoring dan evaluasi, belum terdapat sosialisasi yang memadai sebagai upaya menangani konflik dalam implementasi kebijakan.

Beberapa hal tersebut belum dapat dilakukan di tahun 2023 karena kebijakan baru ditetapkan pada tahun 2021. Saran yang dapat disampaikan untuk periode selanjutnya agar dapat dilakukan sosialisasi lebih intensif, serta perbaikan kebijakan sehingga diharapkan para stakeholder dapat memahami secara jelas atas peraturan tersebut, dan dapat diketahui permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan di lapangan walaupun dalam proses penyusunannya telah dilakukan konsultasi publik. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP karena hanya Ditjen PSDKP yang merumuskan indikator kinerja ini pada tahun 2023.

### IKM 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

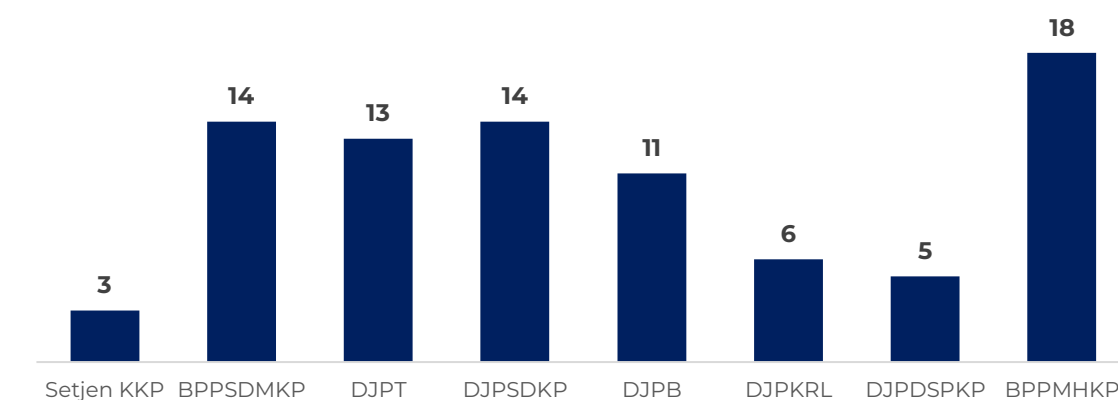
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
5	8	12	12	14	116,67	8	120,00

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2023 tercapai 14 (empat belas) unit kerja dengan predikat WBK, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2023, ditargetkan 2 unit kerja yang berpredikat WBK dan telah tercapai melebihi target yaitu. Faktor utama yang membuat keberhasilan tersebut adalah komitmen pimpinan unit kerja yang tinggi dalam mengawal dari mulai pencanangan, pembangunan sampai dengan evaluasi. Dukungan penuh juga dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP yang melaksanakan pendampingan secara terus menerus sepanjang tahun 2023. Secara keseluruhan Satker UPT Pengawasan SDKP telah dinyatakan WBK dengan rinciannya sebagai berikut:



No	Tahun	Unit Kerja	Nilai
1	2018	Pangkalan PSDKP Bitung	76,79
2	2019	1. Pangkalan PSDKP Jakarta 2. Pangkalan PSDKP Benoa	82,74 82,88
3	2020	1. Pangkalan PSDKP Batam 2. Pangkalan PSDKP Tual	82,27 87,29
4	2021	1. Pangkalan PSDKP Lampulo 2. Stasiun PSDKP Belawan 3. Stasiun PSDKP Cilacap 4. Stasiun PSDKP Pontianak	80,88 78,98 78,56 80,78
5	2022	1. Stasiun PSDKP Tarakan, 2. Stasiun PSDKP Tahuna 3. Stasiun PSDKP Kupang.	88,42 89,91 89,32
6	2023	1. Stasiun PSDKP Ambon 2. Stasiun PSDKP Biak	86,37 82,64

Pangkalan PSDKP Bitung telah dievaluasi kembali predikat tersebut setelah kurun waktu lebih dua tahun pada 2021 dengan hasil penilaian mencapai 80,92. Sebagai upaya mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan pembangunan WBK khususnya pada komponen pengungkit area penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan yaitu peningkatkan komitmen bersama antara pemimpin unit kerja dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan zona integritas tidak hanya dari segi pemenuhan administratif tetapi betul betul diimplementasikan secara nyata. Kegiatan utama yang mendorong pencapaian kinerja ini meliputi pembentukan tim pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang akan diusulkan wilayah bebas dari korupsi, pendampingan secara terus menerus sepanjang tahun dengan supervisi langsung Inspektorat Jenderal KKP, dan Penetapan tim pembina dilingkup satker pusat.



## IKM 11 Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	3,10	3,88	-	-	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2023 akan dilakukan pengukuran pada Tahun 2023.

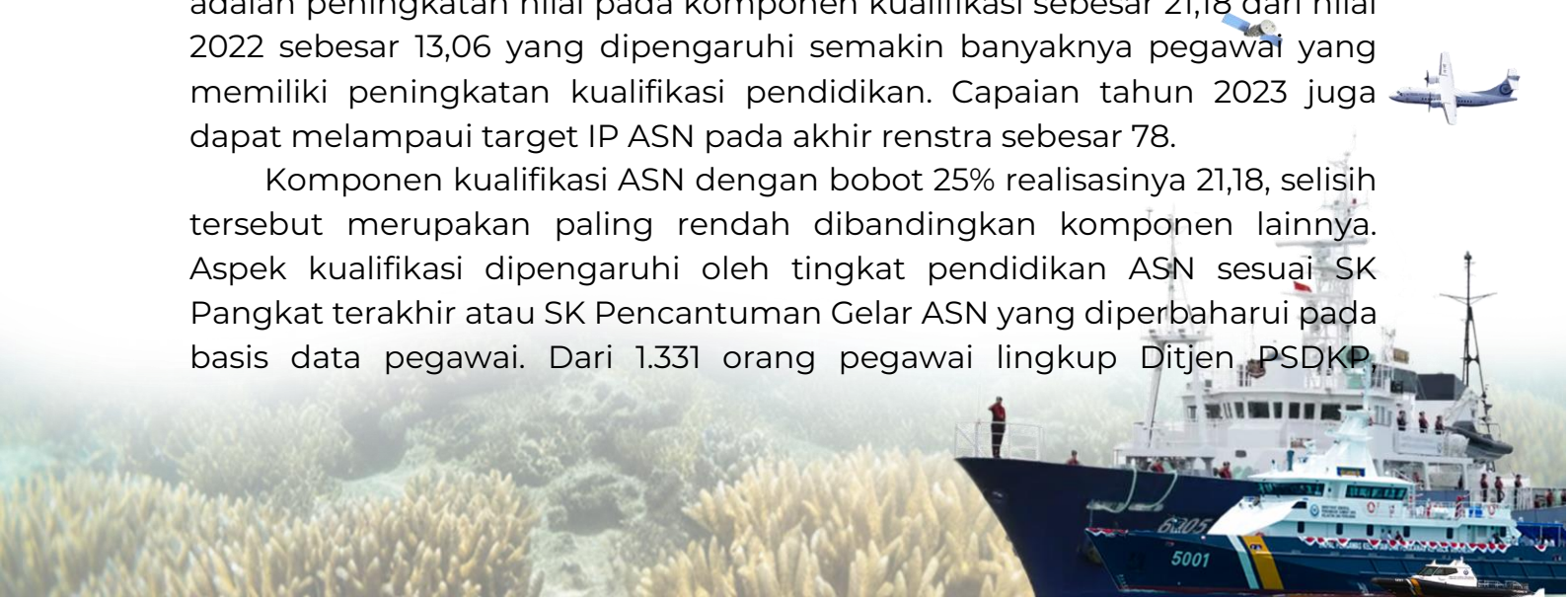
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2023.

## IKM 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
74,39	77,91	80,55	78	87,50	112,18	76	98,66

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2023 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Realisasi capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 sebesar 87,50 dari target sebesar 78 sehingga tingkat capaian sebesar 112,18%. Jika disandingkan dengan tahun 2022 maka ada peningkatan nilai IP ASN sebesar 6,95. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah peningkatan nilai pada komponen kualifikasi sebesar 21,18 dari nilai 2022 sebesar 13,06 yang dipengaruhi semakin banyaknya pegawai yang memiliki peningkatan kualifikasi pendidikan. Capaian tahun 2023 juga dapat melampaui target IP ASN pada akhir renstra sebesar 78.

Komponen kualifikasi ASN dengan bobot 25% realisasinya 21,18, selisih tersebut merupakan paling rendah dibandingkan komponen lainnya. Aspek kualifikasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar ASN yang diperbaharui pada basis data pegawai. Dari 1.331 orang pegawai lingkup Ditjen PSDKP



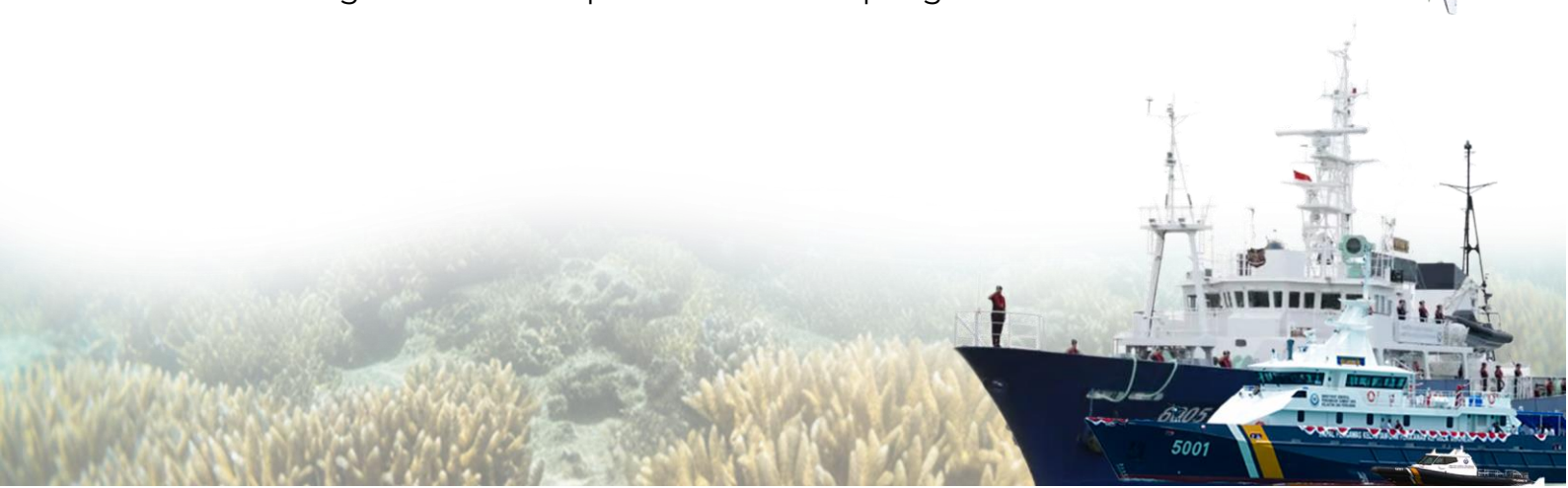
sejumlah 434 orang merupakan Awak Kapal Pengawas lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat maupun UPT dengan kualifikasi pendidikan didominasi setara SMA dan Diploma 3. Lebih lanjut, untuk pegawai dengan jabatan eselon, jabatan fungsional maka harus mengikuti Diklat PIM maupun diklat teknis/fungsional atau diklat sejenis lainnya minimal 20 JP untuk dapat memenuhi kualifikasi standar.

IP ASN Ditjen PSDKP berada di posisi peringkat 7 dari 9 eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan terdapat selisih sebesar 3,11 dengan unit kerja dengan IP ASN tertinggi lingkup KKP yaitu Inspektorat Jenderal KKP. Namun demikian, hal ini juga turut dipengaruhi oleh jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja dimana pada Inspektorat Jenderal KKP memiliki pegawai sebanyak 207 pegawai, atau hanya 16% dari total pegawai Ditjen PSDKP. Namun melihat unit kerja dengan jumlah pegawai banyak yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya serta BPPMHKP maka rentang IP ASN tidak terlalu jauh selisihnya, capaian IP ASN Ditjen PSDKP bahkan mampu mengungguli Setjen dan BPPSDMKP.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas Awak Kapal dengan mengikuti seminar, pelatihan, maupun workshop serta mengikuti diklat yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu. Lebih lanjut, kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan seminar meskipun daring terbatas pada saat Kapal Pengawas sedang sandar atau perbaikan sehingga capaian Jam Pelatihan kurang optimal. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah memberikan kesempatan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan ataupun diklat dengan jumlah Jam Pelajaran yang lebih tinggi.

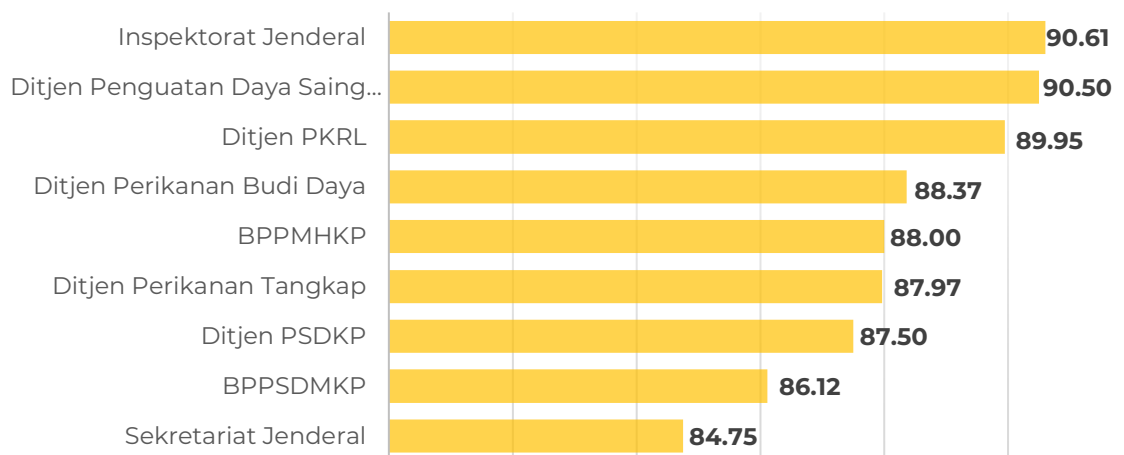
Kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- a. Menyelenggarakan bimbingan teknis antara lain: Bimtek Budaya Pelayanan Prima, Bimtek Peningkatan Integritas ASN, Workshop SAKIP, Bimtek Pengelolaan Kinerja, Bimtek Penyusunan Kebutuhan Diklat (Training Need Analyst).
- b. Melaksanakan pelatihan/diklat teknis antara lain Diklat Dasar ASN PSDKP, Diklat Dasar Pengawas Perikanan, Diklat PPNS Perikanan, Diklattuk Polsus Kelautan, pelatihan pengawasan penangkapan ikan, Bimtek pengawasan budidaya ikan, pengawasan unit pengolahan ikan, Peningkatan Kemampuan Teknik Sampling Air.



Perbandingan dengan eselon I lingkup KKP sebagai berikut:

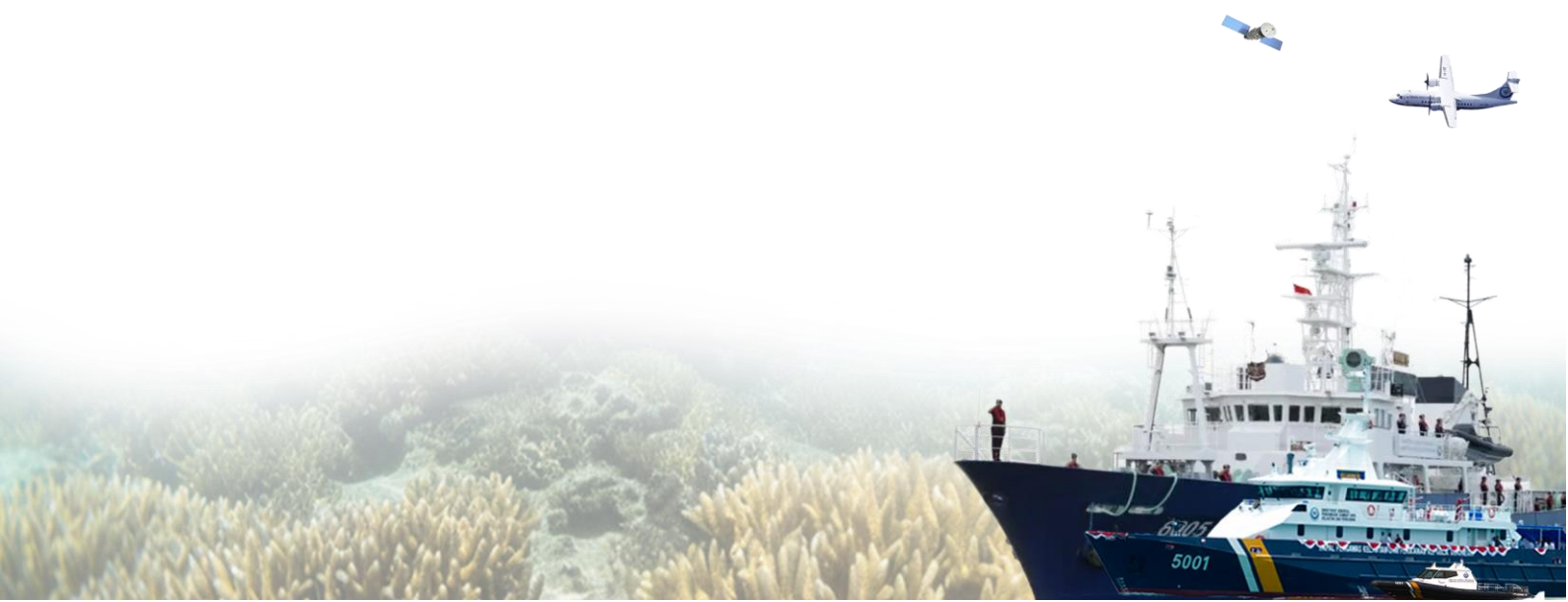
## NILAI IP ASN



### IKM 13 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	% Capaian thd target akhir Renstra
88,86	87,64	81,73	80,5	82,35	102,30	87,75	93,84

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2022 sebesar 81,73 dengan kategori penilaian A, dan interpretasi “memuaskan”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan knowledge manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku aparatur pengawas internal KKP melalui surat nomor: R.168/ITJ.2/HP.440/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



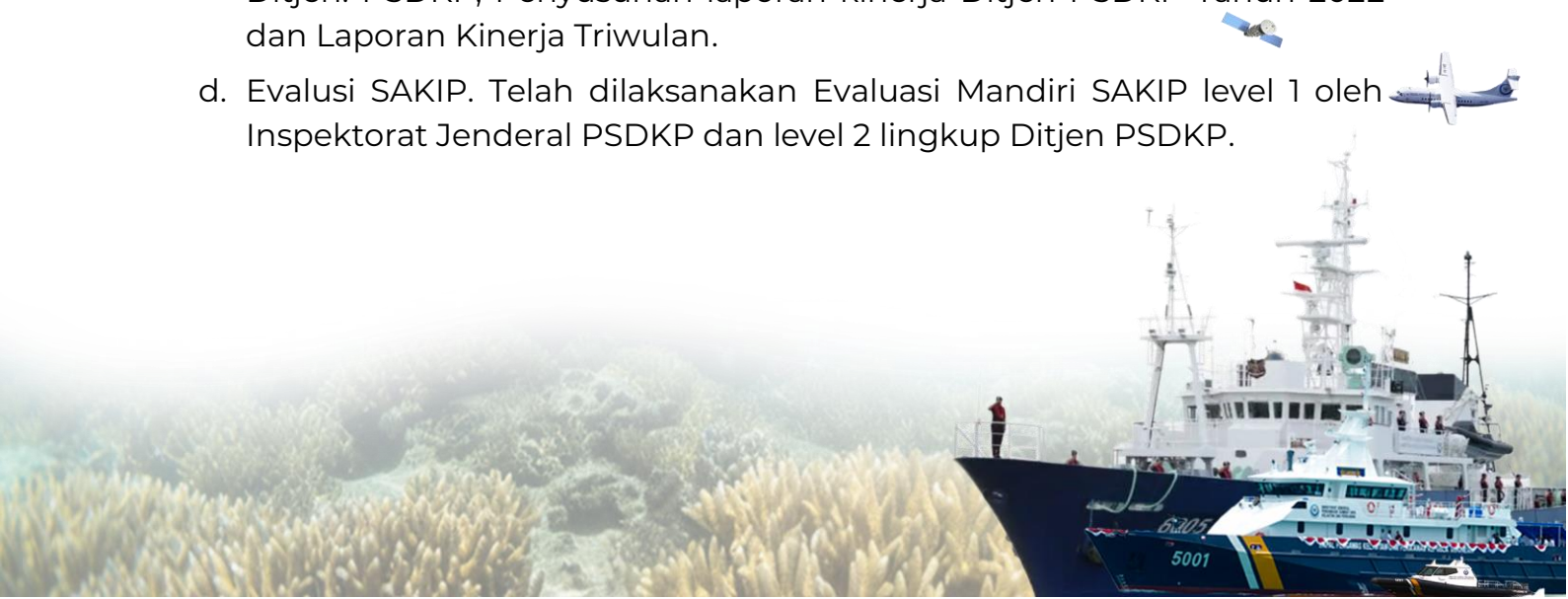
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
			Eselon I	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4
1.	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30	23.70	24.30	22.80	23.70	24.30
2.	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30	26.10	24.60	24.60	26.10	26.10
3.	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15	13.80	11.85	12.60	13.35	11.85
4.	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	25	20.00	20.50	19.25	19.25	19.25
<b>NILAI UNIT KERJA</b>		100	83.60	81.25	79.25	82.40	81.50
			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

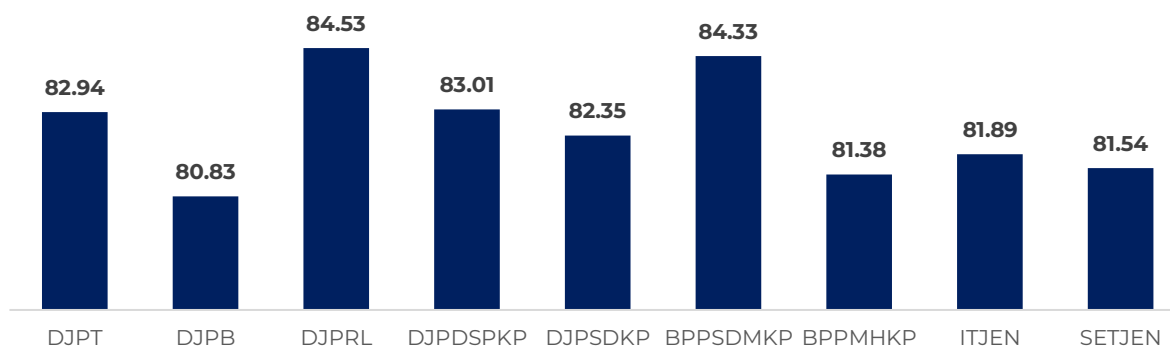
  

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Eselon I	Nilai Unit Kerja Sampel				Nilai AKIP		
				Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Nilai Unit	Nilai Total	%
1.	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>									
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	3.60	0.79	0.79	0.90	0.79	3.26	6.86	76.25
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	5.25	1.50	1.31	1.31	1.50	5.63	10.88	72.50
		<b>30.00</b>	<b>11.85</b>					<b>11.89</b>	<b>23.74</b>	<b>79.13</b>
2.	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>									
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.00	100.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	4.05	1.01	1.01	1.01	1.01	4.05	8.10	90.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	6.00	1.31	1.31	1.50	1.50	5.63	11.63	77.50
		<b>30.00</b>	<b>13.05</b>					<b>12.68</b>	<b>25.73</b>	<b>85.75</b>
3.	<b>PELAPORAN KINERJA</b>									
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38	1.50	3.00	100.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	2.03	0.45	0.45	0.45	0.45	1.80	3.83	85.00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	3.38	0.66	0.75	0.84	0.66	2.91	6.28	83.75
		<b>15.00</b>	<b>6.90</b>					<b>6.21</b>	<b>13.11</b>	<b>87.38</b>
4.	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>									
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	2.25	1.13	1.13	1.13	1.13	2.25	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	3.38	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	6.38	85.00
3.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	4.38	1.25	1.09	1.09	1.09	4.53	8.91	71.25
		<b>25.00</b>	<b>10.00</b>					<b>9.78</b>	<b>19.78</b>	<b>79.13</b>
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>100.00</b>						<b>82.35</b>	

Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja. Dialog kinerja pimpinan lingkup Ditjen PSDKP, Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP; Penyusunan rencana kerja 2023, Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- b. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2022 dan pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja dan capaian triwulan I dan II tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- c. Pelaporan Kinerja. Rekonsiliasi laporan kinerja tahun 2022 lingkup Ditjen. PSDKP, Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Triwulan.
- d. Evaluasi SAKIP. Telah dilaksanakan Evaluasi Mandiri SAKIP level 1 oleh Inspektorat Jenderal PSDKP dan level 2 lingkup Ditjen PSDKP.



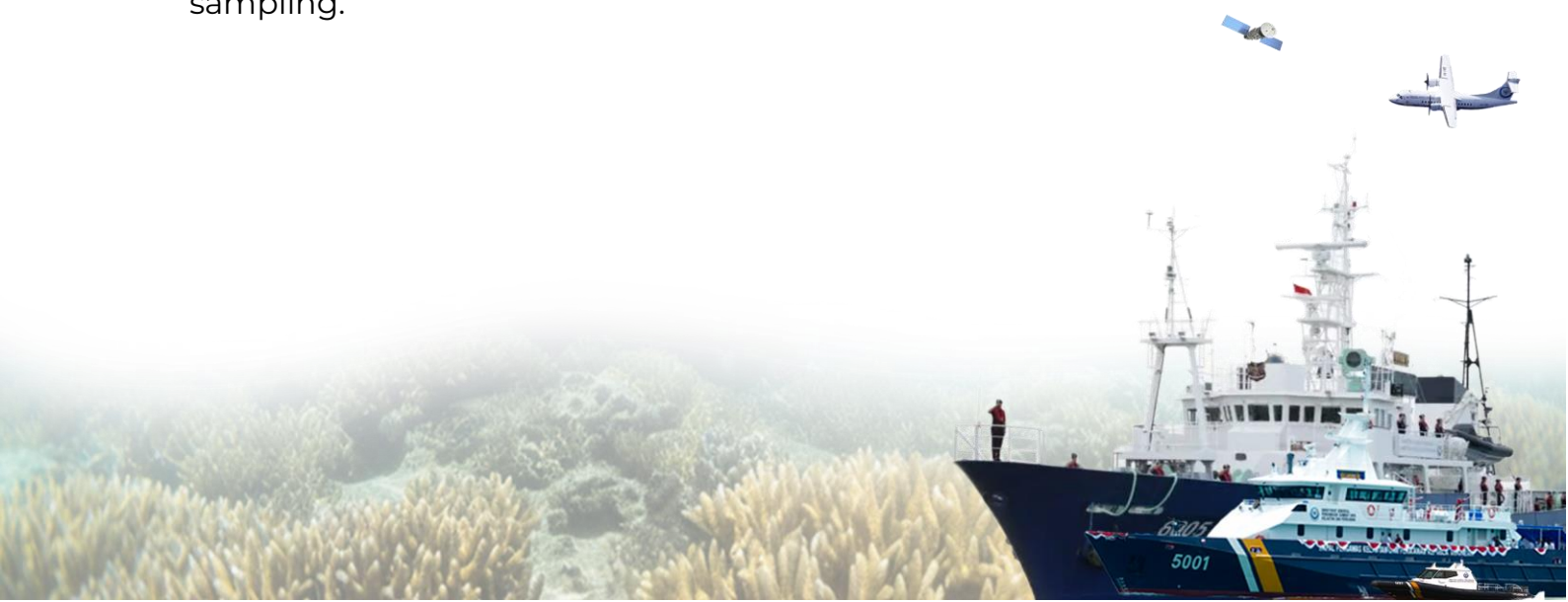


### **IKM 14 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2022**

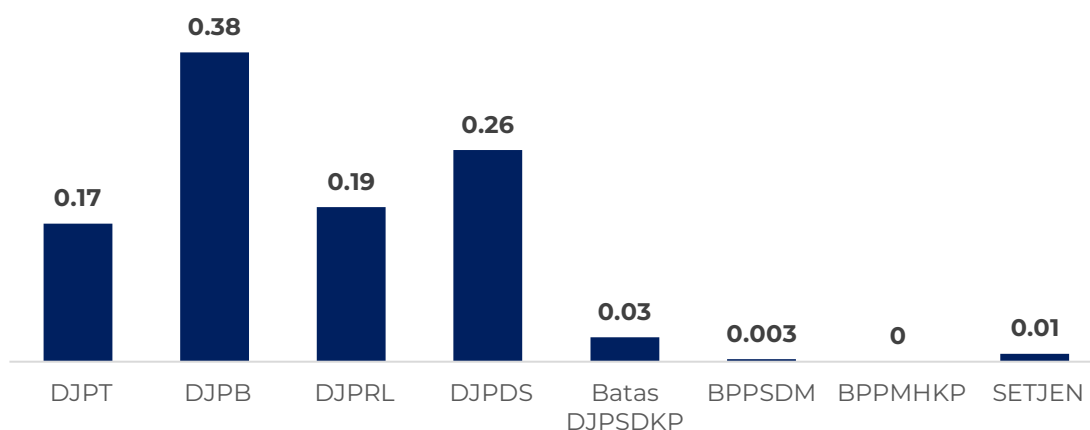
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
0,01	0	0	≤0,5%	0,03%	102,30	<1	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2022 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, tidak terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2023.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi. Selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke lokasi yang di sampling.







### **IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
74%	89,16%	99,11%	75%	100%	120	80	120

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2022 s/d 31 Desember 2023. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas).

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 106/ITJ.0/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2023 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2023, realisasi indikator kinerja dimaksud atas Ditjen PSDKP sebesar 100%. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan karena komitmen yang tinggi dari seluruh unit kerja untuk menyelesaikan setiap rekomendasi yang disampaikan serta pemantauan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh sekretariat Ditjen PSDKP.

Pada tahun 2023 jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk seluruh unit kerja sebanyak 140 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya. Atas unit kerja yang tidak menjadi target pengawasan oleh APIP maka tetap mengampu indikator kinerja yang sama dan menetapkan realisasi sesuai dengan target ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.157/PSDKP.1/TU.140/I/2024 tanggal 12 Januari 2024. Ditjen PSDKP menempati posisi pertama untuk indikator dimaksud atas upaya dan komitmen pemimpin unit kerja dan pegawai untuk dapat menindak lanjuti rekomendasi atas hasil pengawasan terbit





Beberapa upaya yang dilakukan sebagai wujud komitmen unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penagwsan diantaranya:

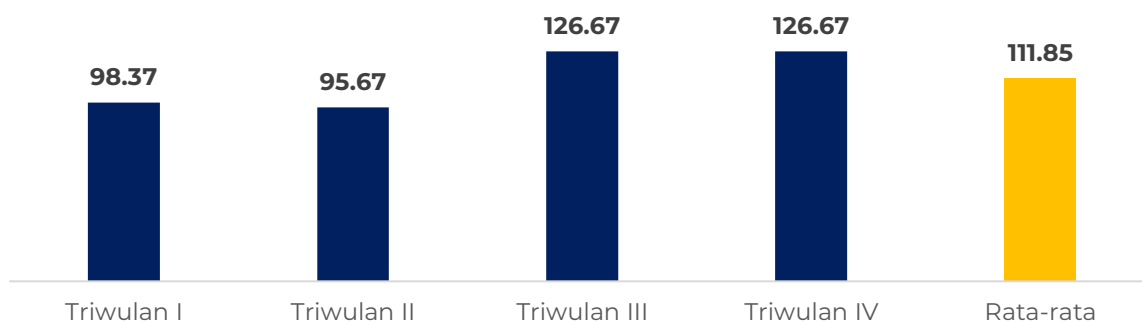
- Memantau jumlah dan jenis rekomendasi hasil pengawasan di Satker lingkup Ditjen PSDKP secara luring dan daring
- Komunikasi dengan APIP untuk mendiskusikan jika terdapat rekomendasi yang kurang dapat dipahami dengan baik dan alternatif upaya tindak lanjutnya
- mengingatkan secara regular kepada setiap unit kerja di lingkup Ditjen PSDKP bahwa upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan merupakan salah satu indikator kinerja di setiap unit kerja Ditjen PSDKP dan harus mendapat perhatian.
- Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya 1) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait 3) monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP.

### **IKM 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar**

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
98,00	99,21	95,10	92%	111,85%	120%	92	120%

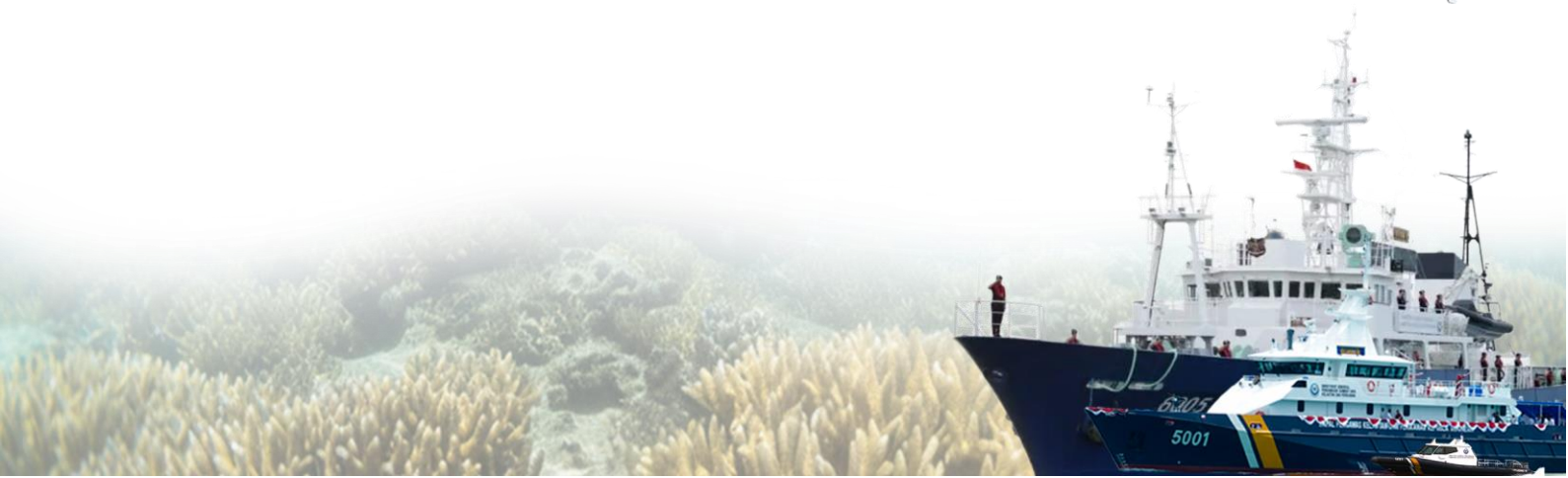
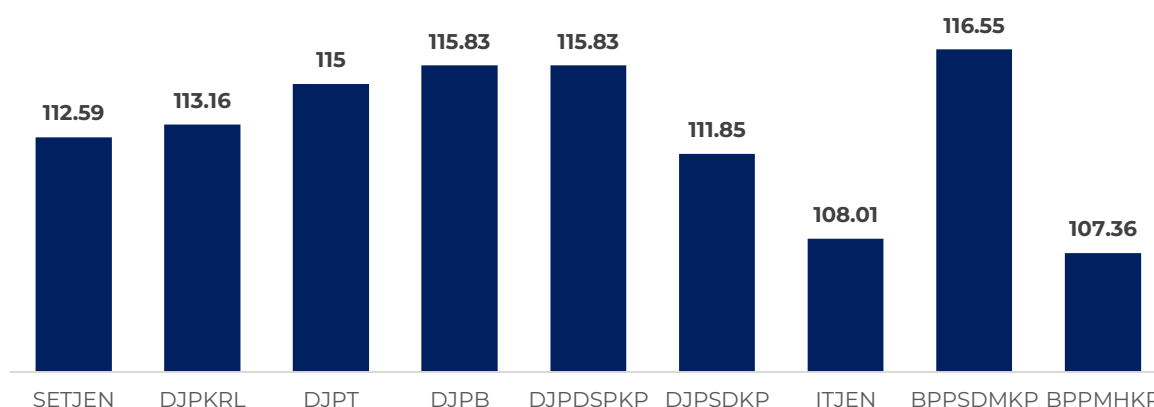
Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 111,85% adalah rata-rata capaian kinerja sepanjang tahun 2023 yang diperoleh dari keaktifan para pejabat eselon II lingkup Ditjen PSDKP melalui *collaboration office*

pada alamat portal.kkp.go.id. Capaian triwulan I-IV Tahun 2023 sebagai berikut:



Penggunaan aplikasi untuk pencapaian indikator kinerja ini mengalami perubahan pada 2023 yang pada awalnya menggunakan aplikasi Bitrix karena telah dibangunnya aplikasi internal yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada dilingkup KKP. Capaian tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan karena keaktifan para pejabat eselon II melebihi target minimal keaktifan yang ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi *Collaboration Office* bersama dengan Pusdatin KKP. Walaupun nilai tercapai namun masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk informasi terbaru sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



## IKM 17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

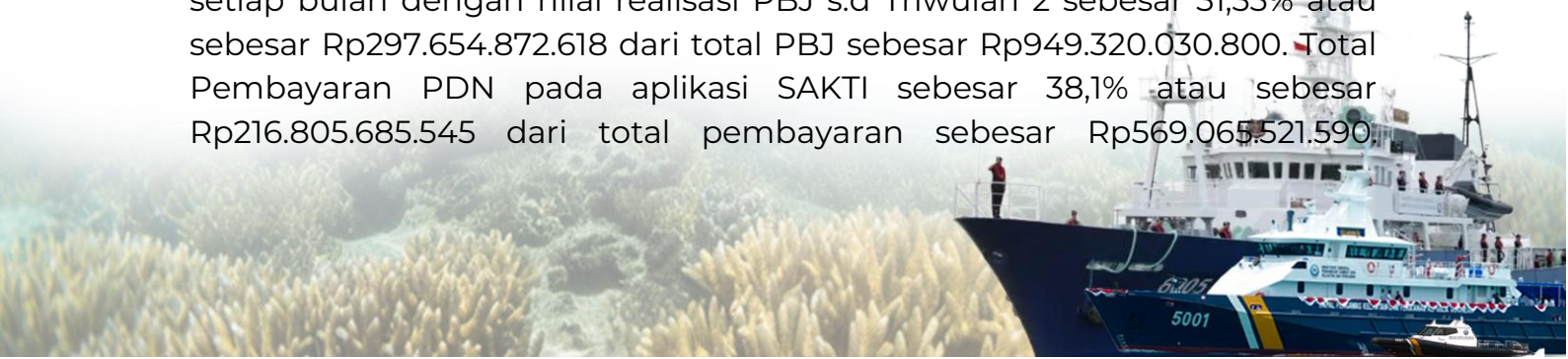
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	83,85	90,58	77,5	90,58	116,88	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan <sup>1)</sup> ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP <sup>2)</sup> perencanaan dan persiapan pengadaan <sup>3)</sup> presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE <sup>4)</sup> kesesuaian tahap pelaksanaan <sup>5)</sup> Laporan penyelenggaraan PBJ <sup>6)</sup> persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan secara mandiri kemudian dilakukan supervisi oleh inspektorat sehingga diperoleh realisasi sebesar 90,58 melebihi target 77,5.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut didukung oleh kepatuhan seluruh satker Ditjen PSDKP dalam proses pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan. Selain itu pendampingan oleh inspektorat mitra secara berkala dan ketat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2023, penginputan data kedalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan, Input pencatatan pengadaan BJ yang sudah dilaksanakan di LPSE.

Pengisian kertas kerja revidu Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan 2, Membahas dan mengusulkan rekomendasi PBJ produk impor dan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibawah 25% TA 2023 tahap III sesuai Nota Dinas Nomor 776/PSDKP.1/PL.420/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 27 produk dan tahap IV sesuai Nota Dinas Nomor 1043/PSDKP.1/PL.420/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 13 produk, kegiatan monitoring dan evaluasi PBJ, Sirup, dan TKDN yang dilakukan setiap bulan dengan nilai realisasi PBJ s.d Triwulan 2 sebesar 31,35% atau sebesar Rp297.654.872.618 dari total PBJ sebesar Rp949.320.030.800. Total Pembayaran PDN pada aplikasi SAKTI sebesar 38,1% atau sebesar Rp216.805.685.545 dari total pembayaran sebesar Rp569.065.521.590.



Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tata cara menghitung dan perekaman TKDN dalam belanja negara pada aplikasi SAKTI Lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2023.

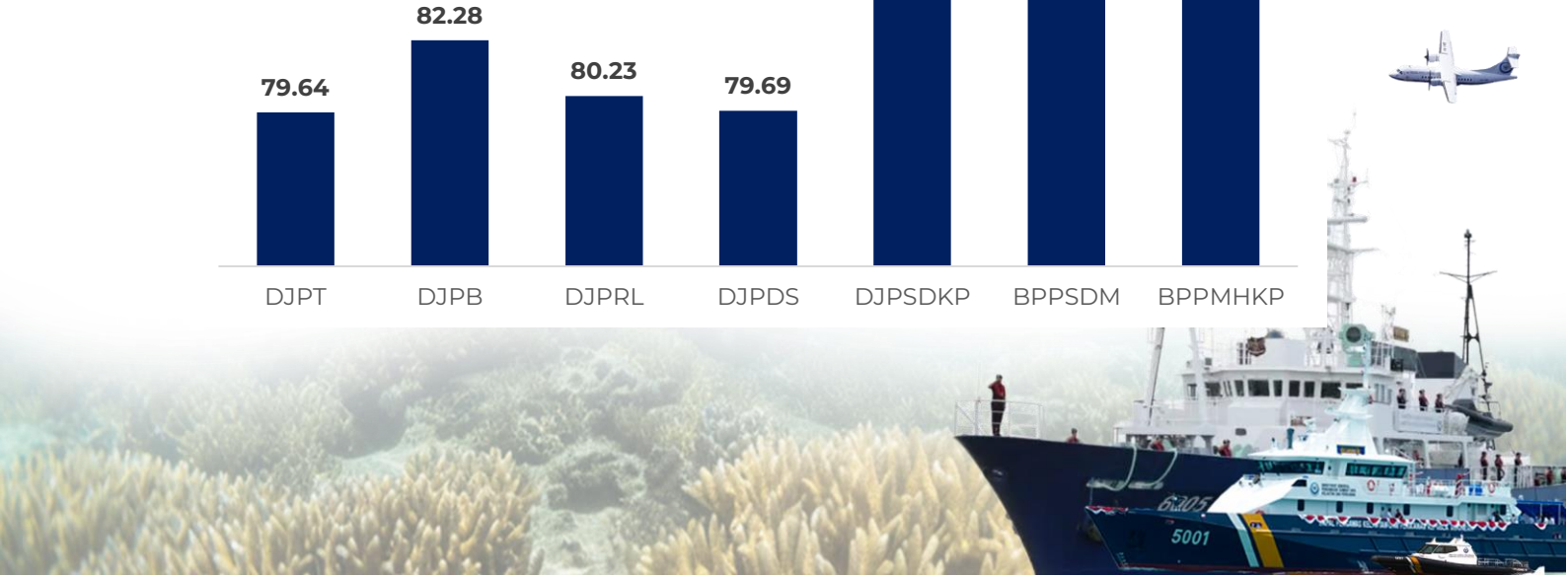
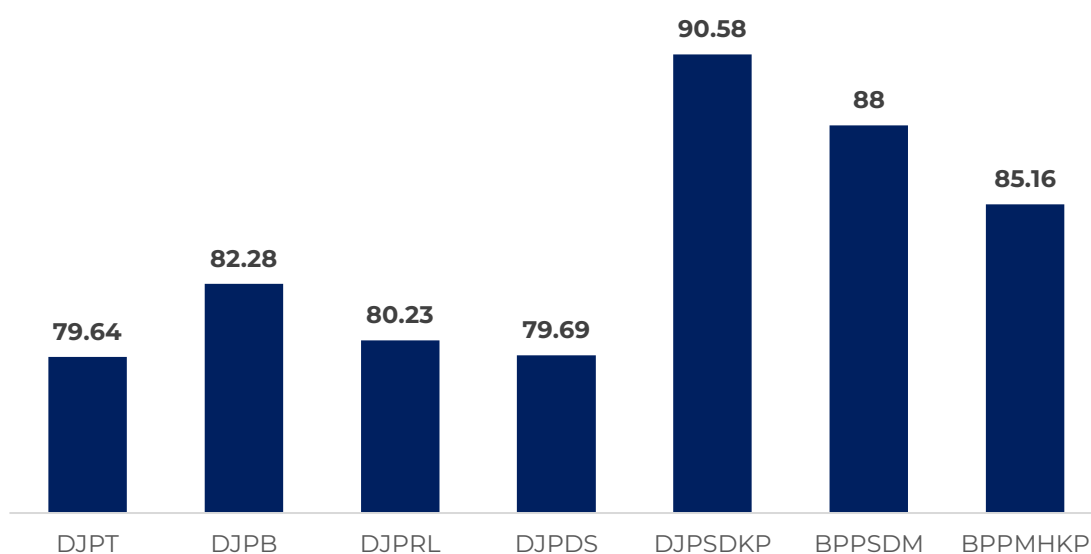
Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Paket pengadaan melalui penyedia belum seluruhnya diumumkan dalam aplikasi SiRUP. Hal ini dikarenakan perubahan SiRUP mengikuti perubahan RKAKL;
- b. Ketersediaan dokumen pada paket pengadaan dengan kontrak perjanjian berbentuk surat perjanjian melebihi bulan Juni tahun berjalan;
- c. Paket pengadaan dikontrakkan melebihi bulan Juni tahun berjalan;
- d. Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian.

Beberapa kendala dalam pengelolaan PBJ adalah:

1. Belum terdapatnya alat yang memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi PBJ lingkup Ditjen PSDKP secara berkala. Alat yang tersedia saat ini yaitu Alat Monitoring dan Evaluasi (AMEL) LPSE serta Bigbox LKPP belum dapat dijadikan acuan dikarenakan masih terdapat angka PBJ yang berbeda, walaupun data yang diambil adalah sama.
2. Setditjen PSDKP belum dilibatkan secara langsung dalam memonitoring dan mengevaluasi PBJ lingkup Ditjen PSDKP. Monitoring dan evaluasi PBJ yang dilakukan baru sebatas data perkembangan PBJ saja. Tidak melihat satu per satu per kegiatan PBJ.

Tahun 2024 pengelolaan PBJ berencana untuk membuat alat atau aplikasi untuk memonitoring dan mengevaluasi PBJ lingkup Ditjen PSDKP secara berkala.



## IKM 18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% thd 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	100	100	77,5	100,00	120,00	-	-

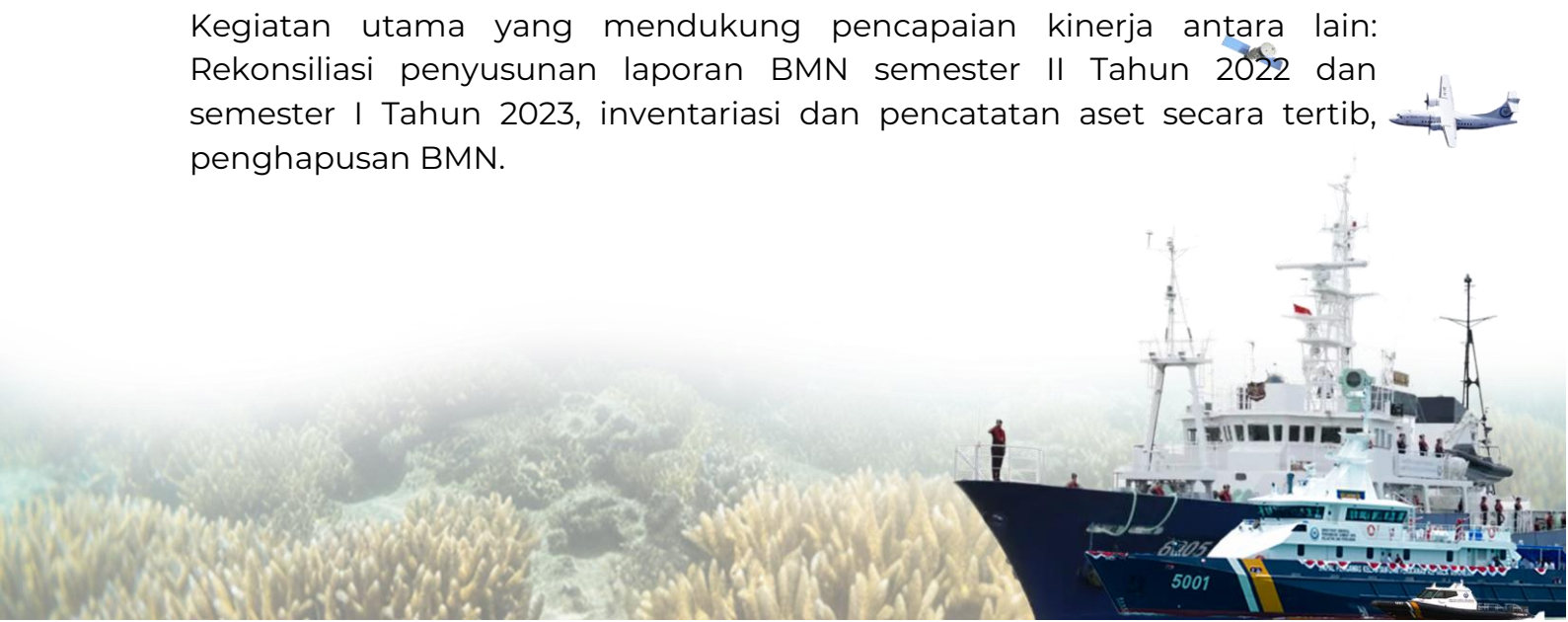
Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan 1) pengelolaan rencana kebutuhan BMN, 2) ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, 3) penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), 4) pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan 5) Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

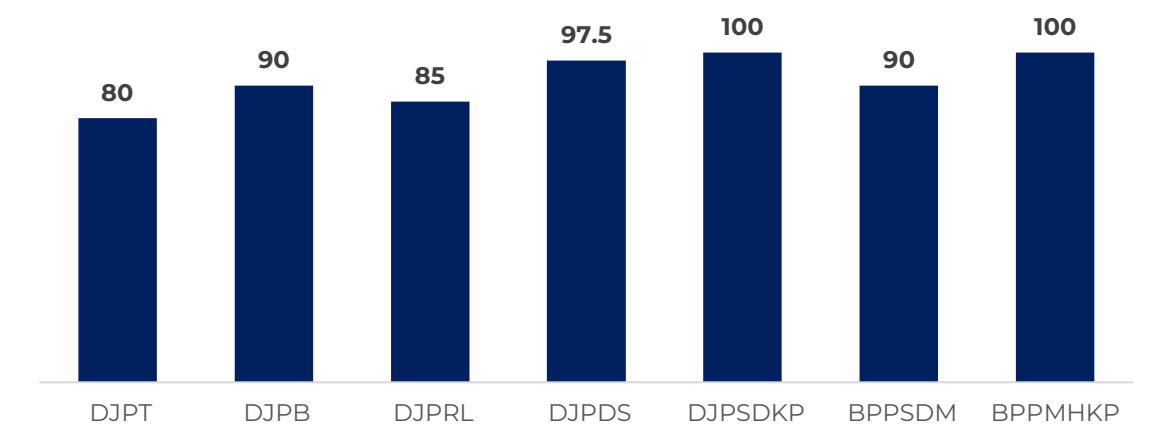
Dengan target 75 realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 sebesar 100 melebihi target yang ditetapkan sebesar 77,5 dengan tingkat capaian sebesar 120%. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi melebihi target adalah:

1. Setditjen PSDKP secara berkala melakukan asistensi dan pendampingan kepada Satker pusat maupun UPT dalam melakukan pengelolaan BMN khususnya pada kegiatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta penghapusan;
2. Semakin tertibnya penatausahaan BMN terutama pada tersediannya Berita Acara pemakaian BMN;
3. Operator SAKTI modul aset dan persediaan bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugasnya.

Kedepan diupayakan beberapa hal yang akan ditatausahaan difokuskan dalam pengelolaan BMN di Tahun 2024 yaitu pengelolaan rumah negara serta penatausahaan BMN dengan nilai buku Rp0.

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: Rekonsiliasi penyusunan laporan BMN semester II Tahun 2022 dan semester I Tahun 2023, inventarisasi dan pencatatan aset secara tertib, penghapusan BMN.



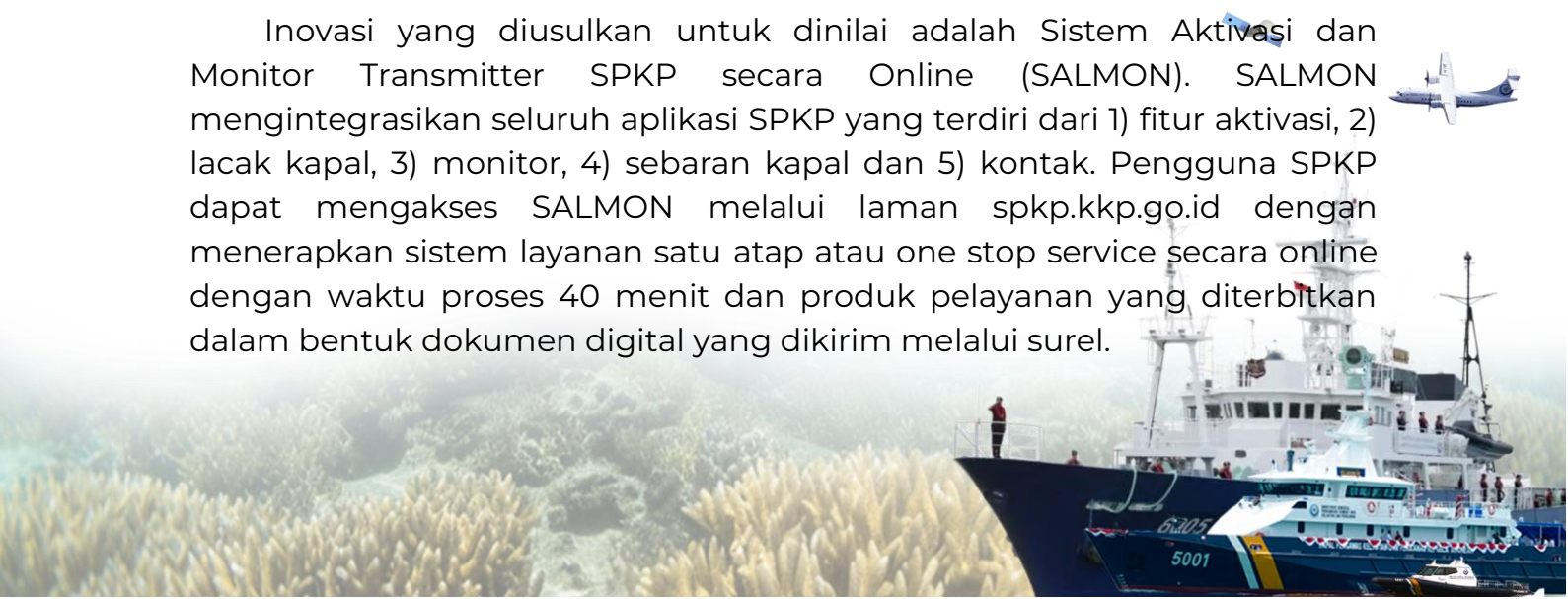


### IKM 19 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

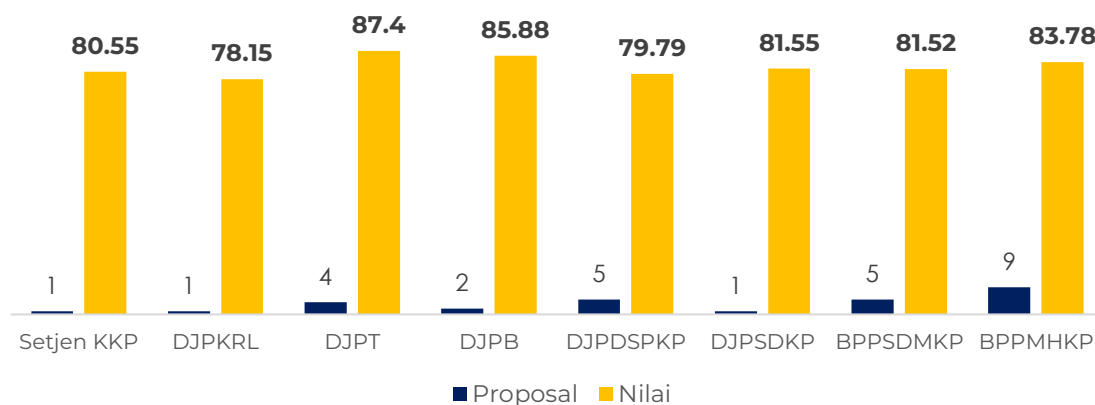
Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	75	81,55	108,73	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Inovasi yang diusulkan untuk dinilai adalah Sistem Aktivasi dan Monitor Transmitter SPKP secara Online (SALMON). SALMON mengintegrasikan seluruh aplikasi SPKP yang terdiri dari 1) fitur aktivasi, 2) lacak kapal, 3) monitor, 4) sebaran kapal dan 5) kontak. Pengguna SPKP dapat mengakses SALMON melalui laman [spkp.kkp.go.id](http://spkp.kkp.go.id) dengan menerapkan sistem layanan satu atap atau one stop service secara online dengan waktu proses 40 menit dan produk pelayanan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang dikirim melalui surel.



Faktor utama tercapainya kinerja melebihi target yang ditetapkan adalah komitmen Ditjen PSDKP setiap tahun selalu mengembangkan fitur-fitur SALMON sesuai dengan kebutuhan stakerholder khususnya pemilik kapal perikanan. Upaya-upaya positif terus dilakukan pada tahun 2023 antara lain peningkatan layanan berupa kemudahan mengakses aplikasi SALMON dapat diunduh dari playstore dengan nama SALMON *Track Mobile*. Evaluasi secara internal oleh UPP dan eksternal oleh Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui SALMON.

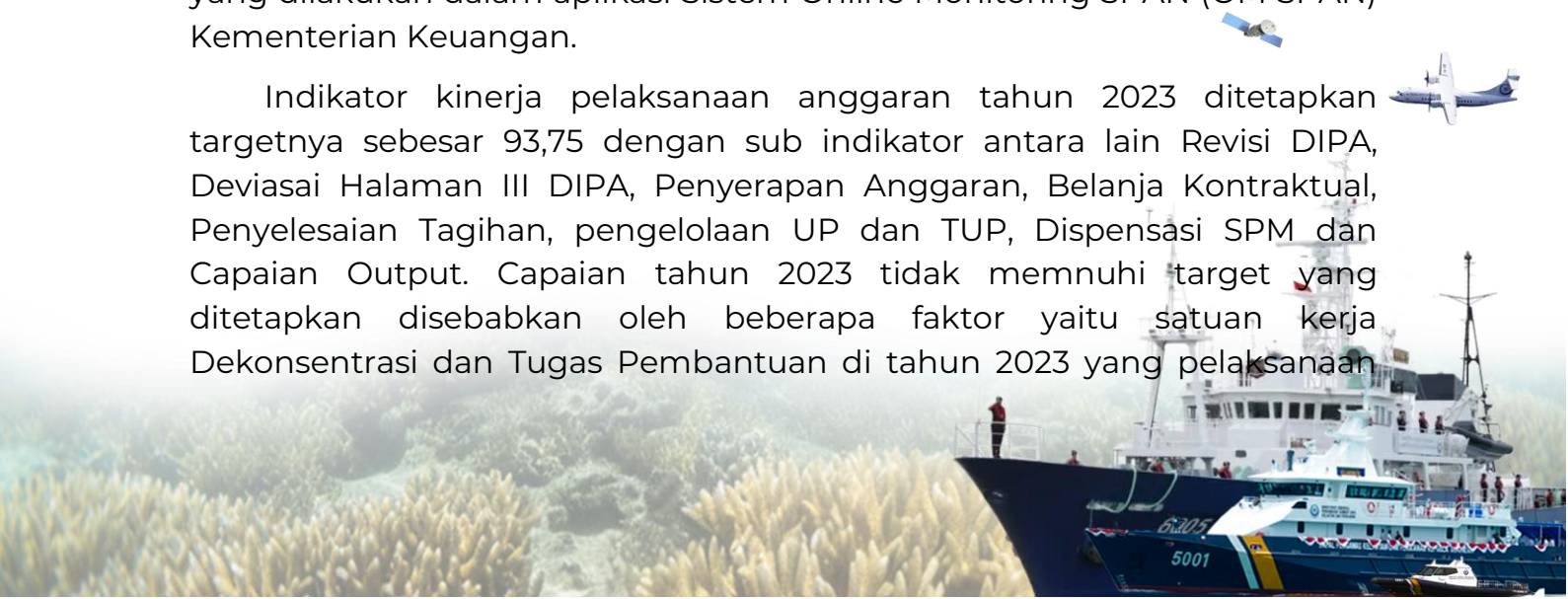


## IKM 20 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
94,78	92,31	94,58	93,75	91,79	97,91	80	114,73

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan.

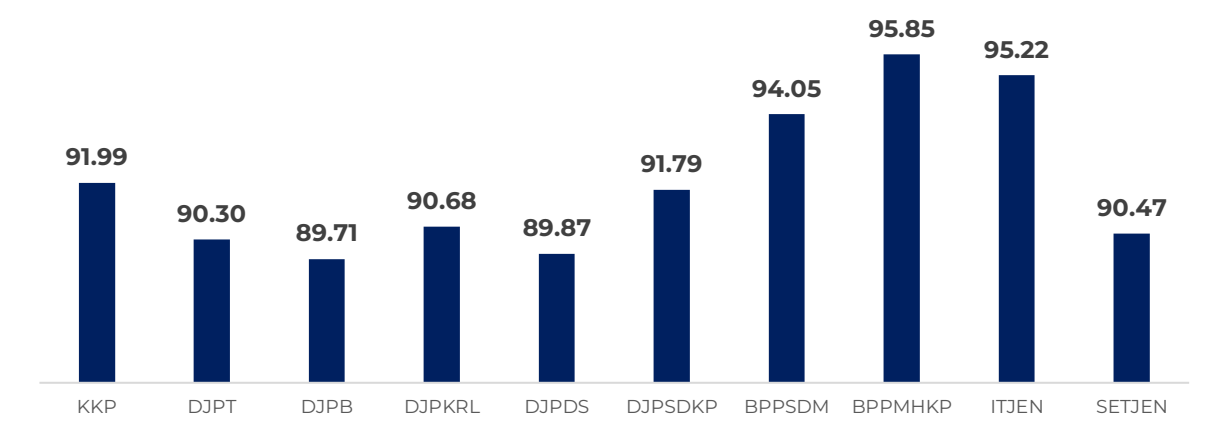
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 ditetapkan targetnya sebesar 93,75 dengan sub indikator antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Capaian tahun 2023 tidak memnuhi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di tahun 2023 yang pelaksanaan





kegiatan dan pengelolaan anggarannya terkendala untuk direalisasikan, khususnya Ditjen PSDKP yang baru dapat terealisasi pada pertengahan tahun 2023.

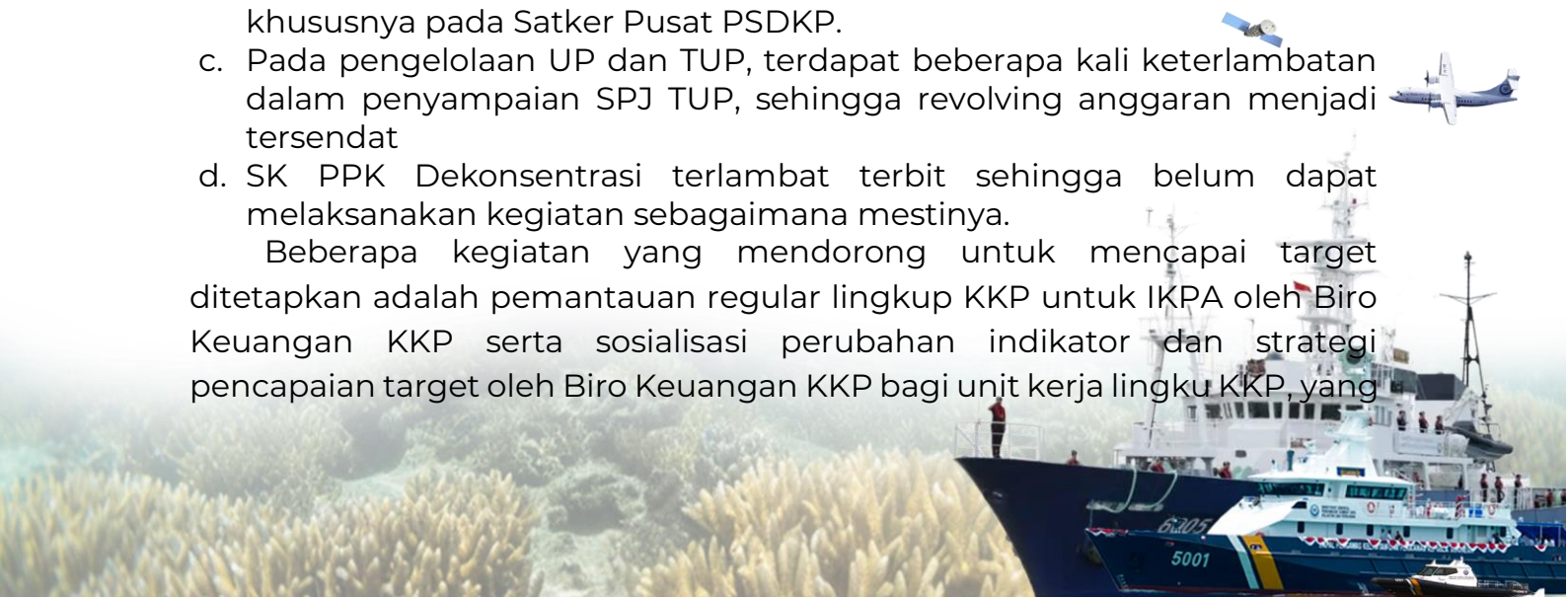
Hal ini karena Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dekonsentrasi 05 tahun 2023 baru disahkan pada 4 Juli 2023. Keterlambatan ini disebabkan revisi untuk penyesuaian Petunjuk teknis Dekonsentrasi merujuk PP Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Permen KP Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan KKP dan Permen KP Nomor 88 tahun 2023 tentang rincian atas Permen KP Nomor 3 tahun 2023. Revisi Juknis Dekonsentrasi menjadi salah satu kendala terlambatnya pengelolaan anggaran sehingga beberapa parameter dalam IKPA tidak dapat dipenuhi dengan baik khususnya pada semester I tahun 2023.



Lebih lanjut, beberapa hal lain yang juga menjadi faktor tidak tercapainya target ditetapkan atas IKPA antara lain:

- Dalam penetapan realisasi triwulanan tidak diiringi dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yg sesuai sehingga terdapat selisih antara RPD triwulanan dan realisasi triwulanan.
- Meskipun terdapat himbauan untuk penyesuaian RPD melalui surat dan pertemuan, tetapi praktek penyesuaian RPD belum terlaksana khususnya pada Satker Pusat PSDKP.
- Pada pengelolaan UP dan TUP, terdapat beberapa kali keterlambatan dalam penyampaian SPJ TUP, sehingga revolving anggaran menjadi tersendat
- SK PPK Dekonsentrasi terlambat terbit sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya.

Beberapa kegiatan yang mendorong untuk mencapai target ditetapkan adalah pemantauan regular lingkup KKP untuk IKPA oleh Biro Keuangan KKP serta sosialisasi perubahan indikator dan strategi pencapaian target oleh Biro Keuangan KKP bagi unit kerja lingkup KKP, yang



diikuti hingga unit kerja terkecil lingkup Ditjen PSDKP.

Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya antara lain:

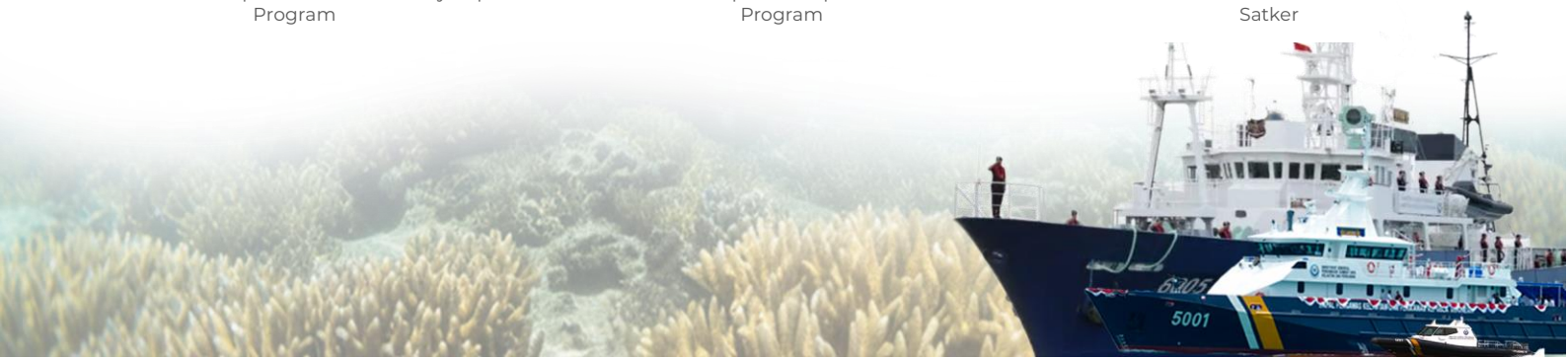
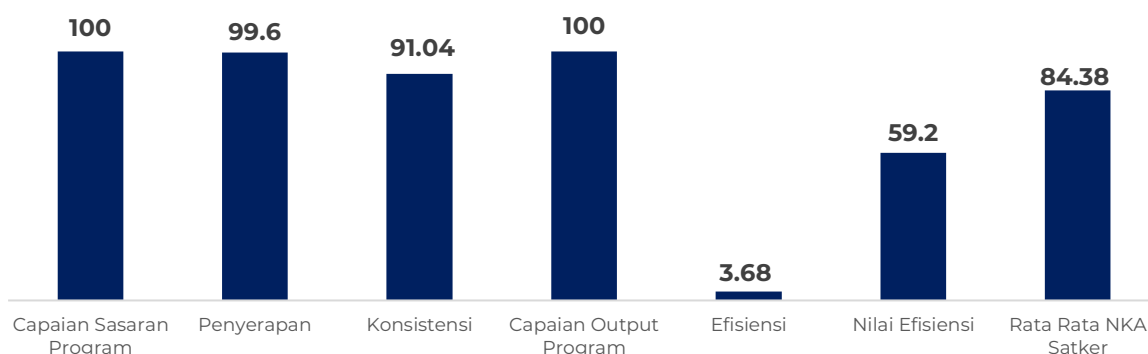
- Direkomendasi untuk sinkronisasi hal III DIPA sebelum bulan berakhir dengan memantau kesesuaian RPD dengan penyerapan anggaran
- Terkait pengelolaan UP dan TUP agar dilaksanakan pemantauan untuk percepatan pertanggungjawaban UP dan TUP setup periode penyelesaian TUP
- Untuk Belanja Kontraktual harus didaftarkan maksimal pada April tahun berjalan dengan tidak lup auntuk memantau anggaran Belanja Kontraktual, dengan dinamika kebijakananggaran yang berlaku di periode selanjutnya.

### IKM 21 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Tahun 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%Capaian thd target akhir Renstra
91,07	89,27	92,47	86	89,97	104,62	89	100,09

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu capaian sasaran program, penyerapan, konsistensi, capaian output program, efisiensi, nilai efisiensi dan rata-rata NKA satker. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2023 sebesar 89,97 dari target 86 atau 104,62%.

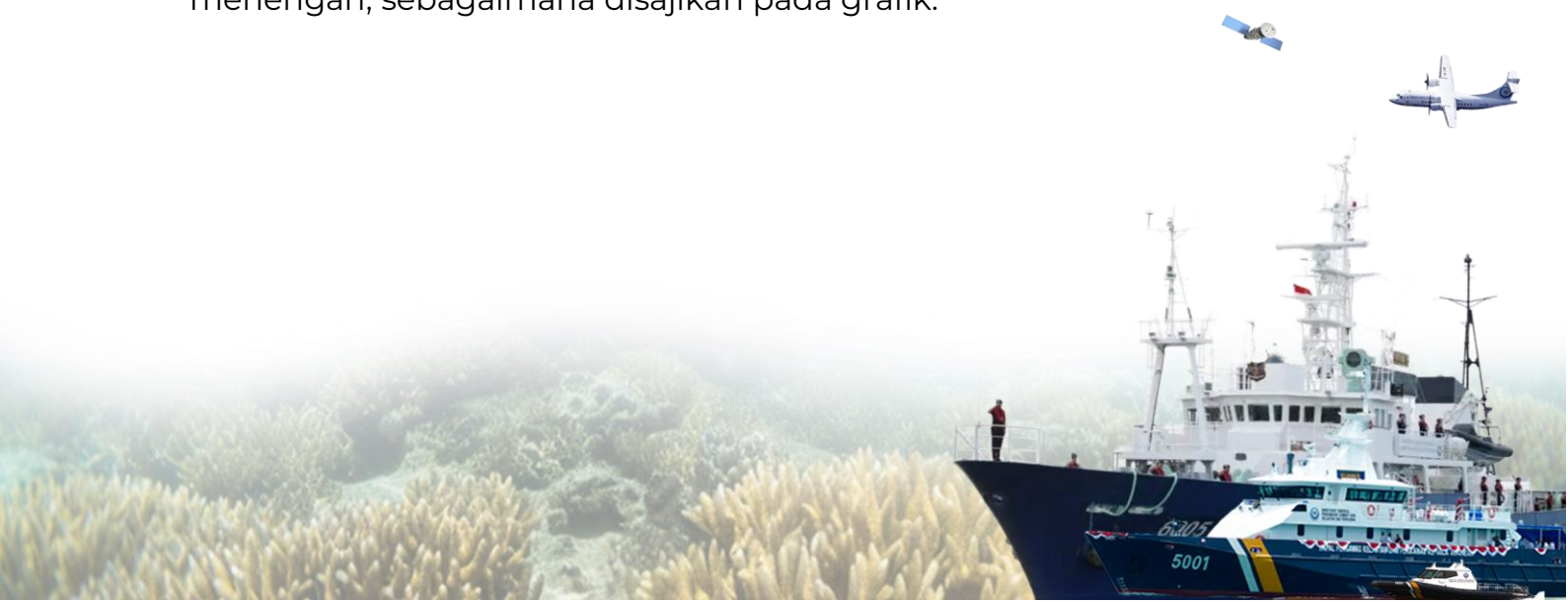
Capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,9% dari capaian tahun 2022, penurunan ini disebabkan adanya perubahan cara penginputan pada capaian output di aplikasi SMART DJA. Tahun 2023 telah ada integrasi data capaian output dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi SMART DJA sehingga proses penginputan capaian output semua di modul Aplikasi SAKTI. Perubahan ini banyak operator yang masih belum mengetahuinya.

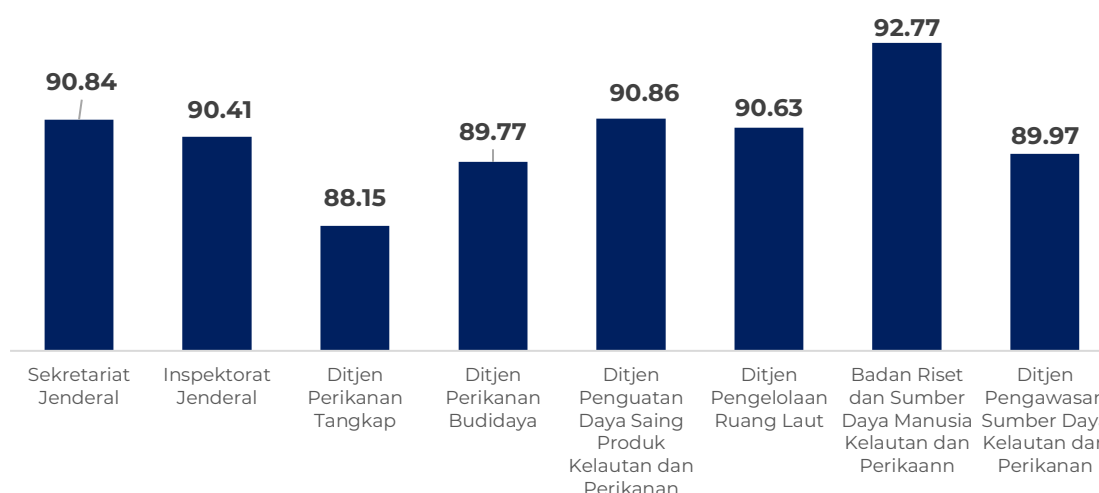


Indikator penilaian tersebut ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
2. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
4. Capaian Output Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
5. Efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
6. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Satker Dekonsentrasi.

Untuk meningkatkan capaian NKA Tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain sosialisasi proses pemginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI dalam rangka untuk meningkatkan capaian pada aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala atas capaian output pada aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP. Apabila dibandingkan dengan eselon I Lingkup KKP, Ditjen PSDKP masih dirata-rata yang menengah, sebagaimana disajikan pada grafik.

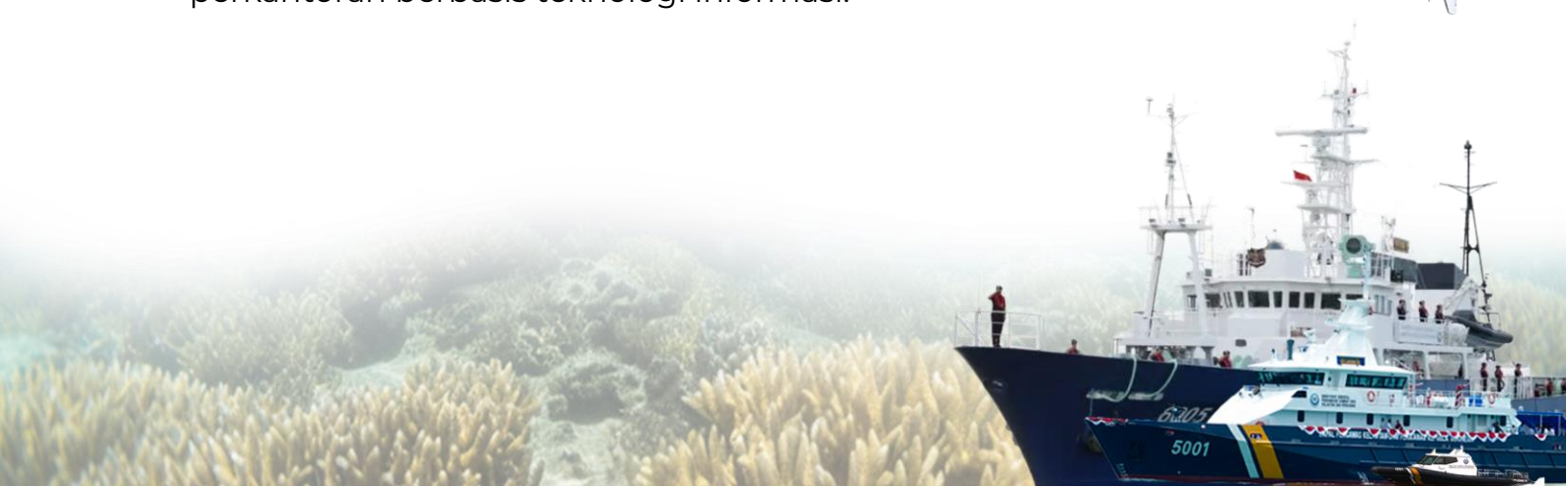




### C. Efisiensi

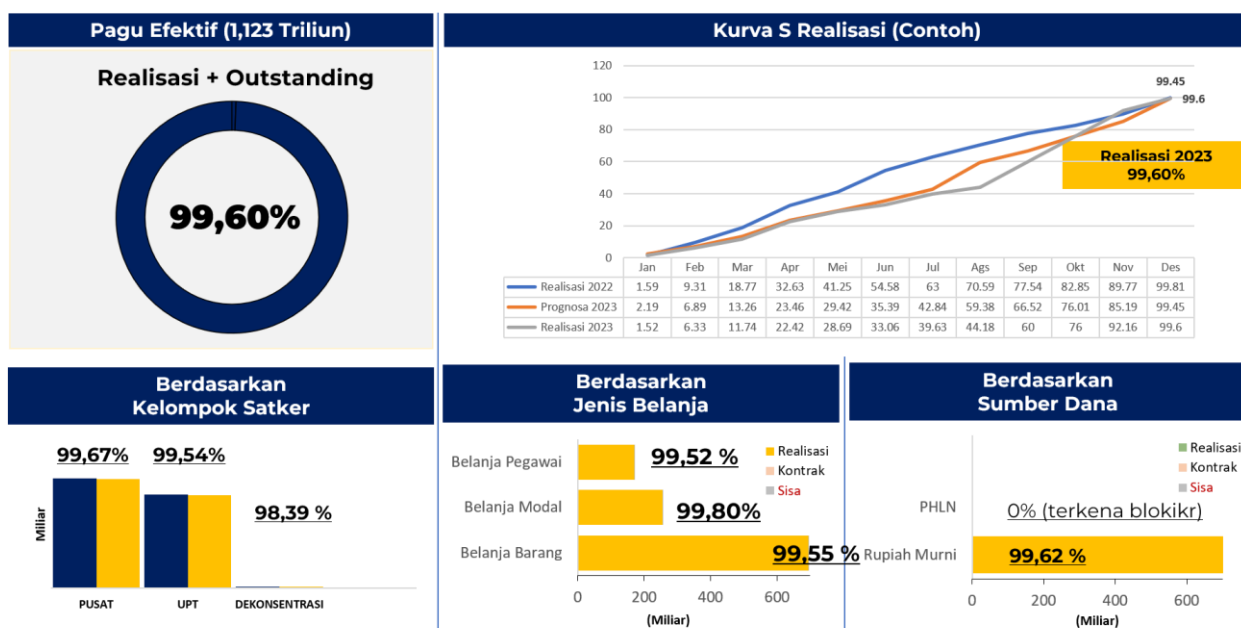
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP sebesar 3,68.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP yaitu pengembangan e-cuti. Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamanatkan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari pakem yang sudah ada menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi.



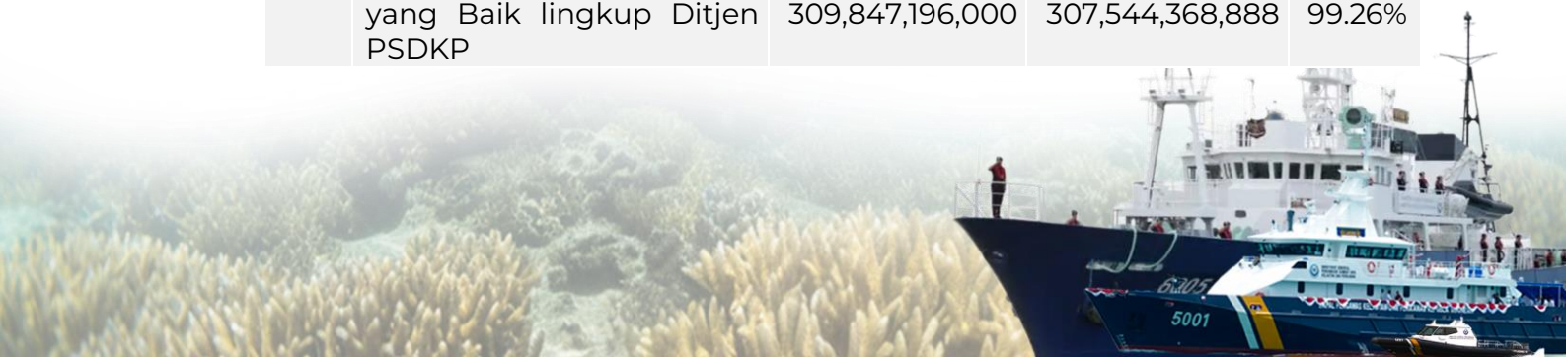
## D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar Rp. 1.123.693.531.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2023 sebesar Rp. 1.119.216.743.475 ; atau 99,60%.



Potret pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran program tahun 2023, sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	27,298,896,000	27,146,675,294	99.44%
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif	781,218,820,000	779,207,202,046	99.74%
3	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	5,328,619,000	5,318,497,247	99.81%
4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	5,328,619,000	5,318,497,247	99.81%
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	309,847,196,000	307,544,368,888	99.26%



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

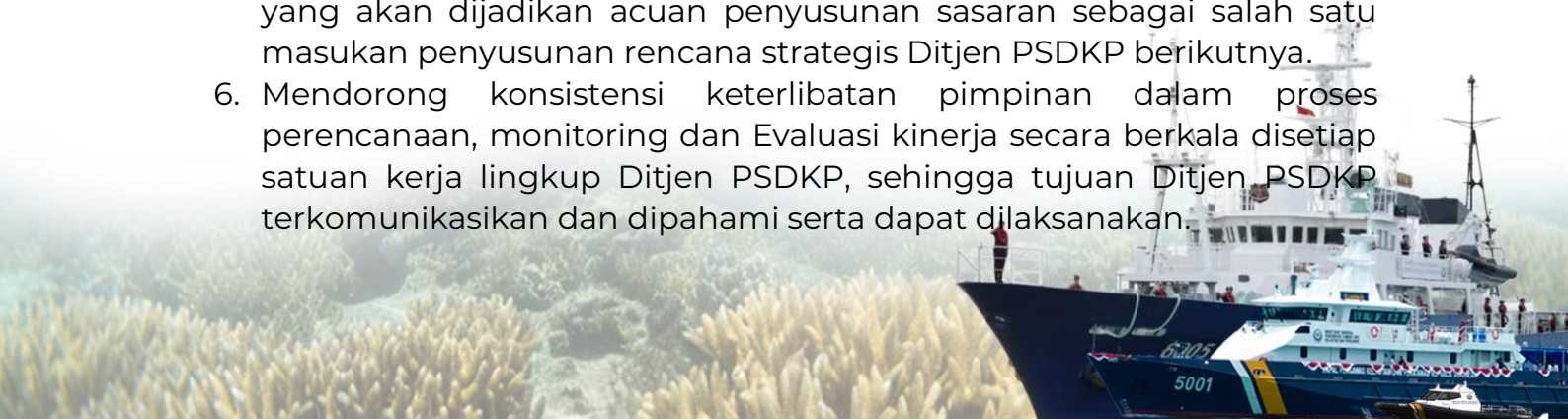
Perencanaan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan indikator kinerja yang pada tahun 2022 memiliki 18 (delapan belas) indikator kinerja menjadi 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dan berubah lagi pada akhir tahun 2023 menjadi 21 (dua puluh satu). Perubahan ini tentunya sudah melalui pembahasan secara mendalam dilingkungan Ditjen PSDKP dengan memperhatikan kebijakan Kementerian kelautan dan perikanan serta manajemen kinerja yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023, dari 21 (dua puluh) indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indeks kinerja pelaksanaan anggaran. Namun secara keseluruhan nilai kinerja organisasi sebesar **113,61%** yang didukung dengan realisasi sebesar **99,60%**.

### B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Membangun Sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi untuk mendukung kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan SDKP melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan pengawasan SDKP.
3. Pengembangan Kelembagaan Pengawasan SDKP didaerah melalui pengusulan penambahan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP.
4. Sinergi pengawasan dan penegakkan hukum bidang kelautan dan perikanan bersama dengan unit kerja lingkup KKP serta instansi terkait lainnya.
5. Pada komponen perencanaan perlu pembahasan dalam rangka penajaman indikator kinerja baik target maupun cara pengukurannya yang akan dijadikan acuan penyusunan sasaran sebagai salah satu masukan penyusunan rencana strategis Ditjen PSDKP berikutnya.
6. Mendorong konsistensi keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala disetiap satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP, sehingga tujuan Ditjen PSDKP terkomunikasikan dan dipahami serta dapat dilaksanakan.





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Adin Nurawaluddin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>			
SP1.1	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73
		2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SP1.2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
		4. Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	89,4
		5. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		6. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80
SP1.3	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	7. Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
SP1.4	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	8. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan (indeks)	86
<b>PROGRAM 2. DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
SP2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	9. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	33,5
		10. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		11. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	12
		12. Level Maturitas SPIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78
		14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5
		15. Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2022 (%)	≤0,5
		17. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		18. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	89
		23. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

## Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>823.000.000.000</b>
SP1.1	<i>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
SP1.2	<i>Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan efektif dan efisien</i>	
2.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>328.263.731.000</b>
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>1.151.263.731.000</b>

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Adin Nurawaluddin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SP1	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73
		2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SP2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
		4. Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	89,4
		5. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		6. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80
SP3	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	7. Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
SP4	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	8. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan (indeks)	86
SP5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	9. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		10. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	12
		11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	3,1
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78
		13. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5
		14. Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2022 (%)	≤0,5
		15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		16. Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal PSDKP(%)	77,5

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		17. Tingkat Kepatuhan BMN Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		18. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75
		19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	93,75
		20. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

## Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>815.168.673.000</b>
SP1.1	<i>Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat</i>	
SP1.2	<i>Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif</i>	
SP1.3	<i>Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
SP1.4	<i>Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>308.524.858.000</b>
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>1.123.693.531.000</b>

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Adin Nurawaluddin**



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN